



**RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR-RI
BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
DEWAN KELAUTAN INDONESIA SERTA PERUM BULOG**

| | | |
|-------------------|---|--|
| Tahun Sidang | : | 2019-2020 |
| Masa Persidangan | : | 1 (Satu) |
| Rapat ke- | : | |
| Jenis Rapat | : | Rapat Dengar Pendapat |
| Sifat Rapat | : | Tertutup – Terbuka |
| Dengan | : | Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI |
| Hari, Tanggal | : | Kamis, 12 September 2019 |
| Waktu | : | 14.00 WIB s/d Selesai |
| Acara | : | 1. Pendalaman RKA KL Tahun Anggaran 2020; 2. Dan Lain-lain. |
| Ketua Rapat | : | Edhy Prabowo, MM, MBA |
| Sekretaris Rapat | : | Drs. Budi Kuntaryo |
| Hadir | : | 28 dari 47 anggota |
| Hadir Mitra Kerja | : | Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI |

ANGGOTA KOMISI IV DPR-RI:

1. EDHY PRABOWO, MM, MBA
2. Drs. H. ROEM KONO
3. DANIEL JOHAN
4. SUDIN
5. Drs. I MADE URIP, M.Si.
6. Ir. MINDO SIANIPAR
7. ONO SURONO, S.T.
8. Ir. EFFENDI SIANIPAR
9. RAHMAT HANDOYO, S.PI, MM
10. RIDWAN ANDI WITTIRI
11. ROBERT JOPPY KARDINAL, S.AB
12. A.A BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA
13. H. M. SALIM FAKHRY, SE, MM.
14. H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., H.H.
15. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.H.
16. Ir. H. EDDY KUNTADI
17. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.

18. dr. FELICITAS TALLULEMBANG
19. Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.
20. EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos
21. M. IRWAN ZULFIKAR, MBA.
22. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S,Ag
23. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP., M.M.
24. Dr. HERMANTO, S.E., M.M
25. Hj. KASRIAH
26. H. ASEP AHMAD MOUSHUL AFFANDY
27. Drs. HASANUDDIN, AS, M.Si.
28. SULAEMAN L. HAMZAH

ANGGOTA YANG IJIN :

1. DR. MICHAEL WATTIMENA, SE., MM.
2. VIVA YOGA MAULADI, M.Si
3. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS
4. Ir. TAGORE ABUBAKAR
5. DJENRI ALTING KENTJEM, S.H., M.H.
6. Drs. WENNY WAROUW
7. Ir. ENDRO HERMONO, MBA
8. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
9. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos.
10. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, SP
11. Drs. UMAR ARSAL
12. Dr. Drs. YUS SUDARSO, S.H., M.H.
13. Drs. IBNU MULTAZAM
14. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.
15. Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si.
16. Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.
17. Drs. FADHOLI
18. Drs. MUCHTAR LUTHFI A.MUTTY, M.Si.
19. Dr. ERISLAN, S.T., M.M.

KETUA RAPAT (EDHY PRABOWO, M.M., MBA):

Bissmillahirrohmanirohim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR-RI,

Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian RI, beserta jajarannya,

Yang terhormat Saudara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya,

Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut atau yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan,.

Yang terhormat Saudara Para Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia beserta Anak Perusahaan PT. Berdikari, PT. Pertani, PT. Sang Hyang Seri dan PT. Inhutani dari I sampai V.

Serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini, marilah kita mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat dan Hidayahnya kita dapat mengadakan rapat dalam keadaan sehat walafiat, guna menjalankan salah satu fungsi tugas DPR-RI yaitu fungsi anggaran.

Sesuai dengan jadwal acara Rapat-rapat DPR-RI Masa Sidang I, Tahun Sidang 2019-2020, yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi, tanggal 23 Juli 2019 dan Surat Pimpinan Badan Anggaran nomor AG/113585/DPRRI/VII/2019 Perihal: penyampaian RUU Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 pada hari Senin, 16 September 2019, Komisi IV DPR-RI menyelenggarakan Rapat Kerja Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengenai penyesuaian RKAKL Tahun 2020 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Kehutanan nomor S676/MENLHK/SETJEN/SET./9/2019 tanggal 19 September 2019 Perihal: Mewakikan kehadiran pada Raker Komisi IV, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyampaikan permohonan ijin tidak dapat hadir dalam Raker pada hari ini dan memohon ijin untuk dapat mewakilkannya kepada Menteri Pertanian untuk dan atas nama Pemerintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR-RI, pada saat ini Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI telah dihadiri dan telah ditandatangani oleh 11 dari 47 anggota dan 8 Fraksi dari 10 Fraksi yang ada. Sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 aya (1), peraturan Tatib DPR-RI, Rapat ini belum kami bisa buka, karena belum memenuhi kuorum, kita bisa membuka dengan menunggu kuorum dengan menskors rapat, tinggal waktu skors saya sarankan 5 menit sesuai juga saran Pak Hasanudin.

Bisa disetujui Pak Sudin, Pak Ono?

Bapak-Ibu sekalian.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirohi*, maka rapat hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum, sekaligus kita skors untuk memenuhi kuorum skors selama 5 menit.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirohim*, Rapat kami buka.

(Rapat dibuka dan di skors pukul: 10.00 WIB)

Skor 5 menit saya cabut.

(Skorsing Rapat dicabut Pukul 10:05 WIB)

Sesuai Undangan Rapat Kerja hari ini dimulai Pukul 10.00 WIB dan akan diakhiri Pukul 12.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Tatib DPR-RI Pasal 226 ayat (1) dan atau sesuai dengan kesepakatan bersama dengan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Menteri Pertanian, dan Menteri LHK, mengenai penyesuaian RKAKL Tahun 2020 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran,
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR-RI,
4. Jawaban Menteri atas tanggapan Anggota Komisi IV DPR-RI,
5. Kesimpulan/keputusan rapat,
6. Penutup,

Apakah acara tersebut dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Berdasarkan Surat Pimpinan Badan Anggaran nomor AG/15093DPRRI/IX/2019 tanggal 10 September 2019 Perihal: Penyampaian hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2020. Bahwa hasil penyempurnaan RKAKL rincian perprogram disampaikan kebadan anggaran sesuai bahan penetapan paling lambat tanggal 16 September 2019 dan sesuai Surat Pimpinan Badan Anggaran tersebut.

Pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2020 Kementerian Pertanian sebesar Rp.21.055.309.526.000 telah mengalami penyesuaian dikomposisi pagu anggaran pereselon I Kementerian Pertanian. Selanjutnya Pagu Alokasi Anggaran Belanja Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebesar Rp.9.319.325.816.000. sehubungan dengan hal tersebut, pada Rapat Kerja hari ini,

Komisi IV DPR-RI ingin mendapatkan penjelasan secara mendetail rincian setiap program pereselon I dari Saudara Menteri.

Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kepada Saudara Menteri untuk dapat menyampaikan penjelasannya.

Kami persilakan.

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Bissmillahirrohmanirohim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR-RI,

Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan atau yang mewakili beliau,

Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili beliau,

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga pada hari ini kita kembali dapat melaksanakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal afiat.

Mengawali Rapat Kerja pada hari ini, perkenankan saya beserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian, mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR-RI, atas undangan Rapat Kerja hari ini dengan agenda Penyesuaian RKAKL Tahun 2020 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Bapak Pimpinan, Anggota Dewan yang kami hormati.

Pada kesempatan Rapat Kerja hari ini, kami akan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020. Dengan beberapa penyesuaian, sesuai dengan usulan dari Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang terhormat.

RK Kementerian Pertanian Tahun 2020 mengacu pada tema rencana kerja pemerintah yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia untuk pertumbuhan berkualitas, yang terdiri lima prioritas nasional pembangunan sektor pertanian 2020, terkait dengan prioritas nasional ketiga yaitu nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja dan prioritas nasional keempat yaitu ketahanan pangan, air, energy dan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan Prioritas Nasional Tahun 2020, Kementerian Pertanian akan tetap fokus pada pemenuhan kecukupan pangan melalui upaya peningkatan produksi dan strategis. Dalam rangka mewujudkan target produksi pangan tersebut, Kementerian Pertanian selain akan mewujudkan kegiatan utama yang telah dirintis tahun sebelumnya seperti bekerja serasi, pengembangan komoditas strategis upswab, modernisasi pertanian dan penyediaan air melalui rehabilitasi, irigasi, infrastruktur embung dan bangunan air lainnya.

Kementerian Pertanian juga memprioritaskan peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang ditunjukkan untuk peningkatan SDM Pertanian. Salah satu kegiatan unggulan melibatkan SDM Pertanian adalah gerakan Petani Milenial orientasi ekspor. Untuk pelaksanaan kegiatan utama dalam rangka peningkatan produksi pangan strategis tersebut. Kementerian Pertanian mendapatkan pagu anggaran 2020 sebesar 21,05 triliun. Pagu anggaran 2020 tersebut dialokasikan pada 11 eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bapak Pimpinan Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Dalam rangka menindaklanjuti masukan Anggota Dewan yang terhormat, pada saat Rapat Dengar Pendapat RDP tanggal 22 Agustus 2019 dan tanggal 12 September 2019, serta masukan saat Rapat Kerja Kementerian Pertanian dengan DPR tanggal 9 September 2019. Pada kesempatan Rapat Kerja hari ini, ijinkan kami melaporkan beberapa penyesuaian rencana kerja tahun 2020 sebagai berikut:

1. Program sarjana membangun desa yang sangat berperan dalam pengawalan pembangunan pertanian di pedesaan, akan dilaksanakan kembali di tahun 2020, khususnya melalui kegiatan yang ada di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,
2. demikian pula tenaga pendamping perkebunan dan subsektor lainnya yang sudah ada akan tetap dipertahankan di tahun 2020.
3. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Pekan Nasional Kontak tani, nelayan andalan Penas, KTNA tahun 2020 di Sumatera Barat.
4. Melalui alokasi anggaran dimasing-masing eselon I sesuai fungsinya, dengan total anggaran sebesar 28,46 miliar.
5. Program penguatan data sistem penyuluhan pertanian. Program hilirisasi komoditas perkebunan, teknologi. Untuk komponisasi pengairan lahan diprogram melalui demplot empat poin kosong telah dianggarkan Dirjen PSP dan Badan Litbang Pertanian.
6. program penguatan Badan Layanan Umum yang telah dianggarkan di Ditjen PSP.
7. Peningkatan kualitas dan jangkauan pengawasan.
8. Dalam rangka penguatan SDM Pertanian telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas penyuluh dan diklat vokasi pada badan PPSDMP.

Demikian dalam rangka inovasi dan desiminasi perbenihan telah dilakukan pengawalan oleh Badan Litbang Pertanian.

Bapak Pimpinan Anggota Dewan yang kami hormati.

Berdasarkan berbagai masukan dari Anggota Komisi IV DPR-RI yang terhormat. Maka diperlukan usulan penyesuaian alokasi anggaran pereselon I sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal 15 miliar, dari semula 90,33 miliar menjadi 105,33 miliar.
2. Direktora Jenderal PSP, diusulkan penambahan 100 miliar dari alokasi anggaran sebelumnya 3,4 triliun menjadi 3,5 triliun.
3. Badan Litbang Pertanian diusulkan meningkat 10 miliar dari semula 1,79 triliun menjadi 1,8 triliun.
4. Badan PPSDMP mengalami peningkatan 75 miliar dari semula 1,63 triliun menjadi 1,7 triliun.

Total tambahan 200 miliar untuk Ditjen-ditjen PSP dan Badan Litbang Pertanian serta badan PPSD, SDM Pertanian tersebut diusulkan diambil dari anggaran Ditjen Tanaman Pangan, sehingga anggaran Ditjen Tanaman Pangan berubah dari 5,96 triliun menjadi 5,76 triliun. Sementara itu untuk mengakomodasi usulan DPR lainnya cukup dilakukan realokasi antara anggaran kegiatan dimasing-masing eselon I. Walaupun terjadi perubahan alokasi anggaran Tahun 2020 antara beberapa eselon I, seperti tersebut di atas namun tidak berubah total pagu alokasi anggaran Kementan 2020 sebesar 21,05 triliun.

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan Rapat Kerja hari ini. Berapa besar harapan kami, melalui Rapat Kerja ini, usulan penyesuaian RKA Kementerian Pertanian tahun 2020 mendapatkan persetujuan Pimpinan dan Anggota Dewan terhormat.

Selanjutnya, apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci, kami mohon berkenan pimpinan agar eselon I yang bersangkutan dapat diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan. Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR-RI kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Ijin Pak ketua, kami lanjutkan mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membacakan anggaran Tahun 2020.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor 669/MK.02/2019 tanggal 11 Desember 2019 Kementerian LHK memperoleh pagu anggaran Tahun 2020 sebesar Rp.9.319.325.816.000 dengan rincian sebagai berikut.

1. Untuk belanja pegawai gaji dan tunjangan untuk seluruh pegawai sebesar Rp.2.011.861.690.000.

2. Untuk belanja operasional kebutuhan kantor, pemeliharaan aset kantor sewa langganan daya dan jasa sebesar Rp.789.601.775.000.
3. Untuk kegiatan Kementerian LHK untuk dukungan pencapaian target kinerja sebesar Rp.6.517.862.351.000.

Melalui Rapat Kerja ini kami mohon persetujuan Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR-RI atas pagu alokasi Kementerian LHK Tahun Anggaran 2020 sebagai konfigurasi berikut.

1. Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya KLHK sebesar Rp.592.759.666.000.
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bindang LHK sebesar Rp.86.966.609.000.
3. Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestasi dan Usaha Kehutanan sebesar Rp.301.754.834.000.
4. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung sebesar Rp.2.799.916.214.000.
5. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp.2.049.226.996.000.
6. Program Planology dan Tata Lingkungan sebesar Rp.480.427.464.000.
7. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp.339.833.245.000.
8. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sebesar Rp.341.386.089.000.
9. Program Kebutuhan Sosial Kemitraan Lingkungan Sebesar Rp.458.679.200.000.
10. Program Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp.468.790.771.000.
11. Program Pengendalian Perumahan Iklim sebesar Rp.313.272.8.....(suara terputus)
12.(suara terputus) produksi Lestari dan Usaha Kehutanan sebesar Rp.301.754.834.000.
13. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung sebesar Rp.2.799.916.214.000.
14. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp.2.049.226.996.000.
15. Program Planology dan Tata Lingkungan sebesar Rp.480.427.464.000.
16. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp.339.833.245.000.
17. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sebesar Rp.341.386.089.000.
18. Program Kebutuhan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp.458.679.200.000.
19. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp.468.790.771.000.

20. Program Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp.313.272.831.000.
21. Program Pengelolaan Sampah Limba dan B3 sebesar 361.844.139.000
22. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp.357.472.233.000.

Sehingga total Kementerian LHK adalah Rp.9.006.330.291.000. Badan Restorasi Gambut sebesar Rp.312.995.525.000. Sehingga total Kementerian LHK dan BRG adalah Rp.9.319.325.816.000. Kami mengharapkan persetujuan yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV atas pagu alokasi Kementerian LHK Tahun 2020 kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang berharga serta arahan dari Pimpinan untuk disetujui.

Wassalaamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Bapak-Ibu sekalian.

Demikian penyampaian anggaran dari Kementerian Pertanian dan Kehuatan. Ada pendalaman mungkin. Kami berikan kesempatan dari Banggar dulu.

F-PDIP (SUDIN, SE.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ia Pak Sudin.
Pak Sudin, Pak Hermantoh, Pak Hasanuddin.
Kami persilakan Pak Sudin.

F-PDIP (SUDIN, SE.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya hanya menanyakan perihal. Waktu itu Kementerian LHK mengundang kita Pimpinan dan Kapoksi ke Kosta Rik, tapi pada saat mau berangkat tiba-tiba dibatalkan. Apakah hal ini benar atau tidak. Saya minta dijawab dulu, karena kami ini bukan pengangguran Pakk, kami ini semua pengurus partai, semua jadwalnya sudah terjadwal, tiba-tiba dibatalkan detik-detik terakhir. Kalau memang tidak bisa, ia tidak bisa, jangan kami ditawarkan. Kalau masalah keluar negeri, saya rasa kami juga punya uang kok. Tolong Saudara Sekjen menjelaskan hal ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ia, Pak Hermantoh silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi, Anggota Komisi,
Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan,**

Pertama saya ingin menyampaikan permintaan pada Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI. Hampir setiap jam saya menerima laporan perkembangan Karhutla di kawasan Riau. Sampai pagi tadi saya pun juga masih menerima perkembangan itu dan cakupan dari asap yang diproduksi oleh Karhutlah itu sudah menjangkau kawasan-kawasan provinsi tetangganya. Dan berdasarkan laporan yang ada dari masyarakat, bahwa kebaran itu telah berdampak luas terhadap kehidupan ekonomi, pendidikan dan juga sektor pertanian. Dan juga sektor sekarang ini kita juga menyaksikan bagaimana hewan-hewan yang hidup di dalam hutan itu juga sebagian besarnya sudah meninggalkan hutan, saya pikir habitanya sudah sangat terganggu sekali.

Nah kami minta berapa pekan yang lalu saya berkomunikasi dengan Ibu Menteri, dan Ibu Menteri menjawab bahwa dia akan segera melakukan pemadam itu, tapi sampai sekarang masyarakat tidak merasakan upayah-upayah itu. Oleh karena itu dalam porum yang sangat pantas untuk mengambil keputusan, saya minta Kementerian Lingkungan dan Kehutanan melalui Sekjennya, minta Ibu Menteri dan juga minta Presiden untuk segera melakukan tindakan pemadaman sehingga dampak negatifnya dampak terhadap pertemuan ekonomi dan segala macamnya bisa diatasi. Itu permintaan pertama kepada Kementerian.

Kemudian kepada Kementerian, kedua Kementerian saya mengapresiasi anggaran ini semoga anggaran ini sudah menyerap seluruh apa yang diinginkan yang berdasarkan kewilayahan pada Rapat RDP yang lalu. Saya yakin itu sudah tercantum, semoga anggaran ini bisa memberantas dan bisa mengurangi jumlah kemiskinan disektor pertanian, dimasyarakat sekitar hutan dan juga disektor nelayan.

Demikian Pak Ketua. Saya mengapresiasi anggaran ini, semoga anggaran ini bisa kita efektifkan dan kita efisiensi.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Selanjutnya Pak Hasanuddin.

F-PPP (HASANUDDIN):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahterah untuk kita semua,

Ketua, Wakil Ketu, Saudara-saudaraku tercinta,

Anggota Komisi IV yang berbahagia.

Bapak-Ibu, Menteri dan seluruh Eselon I dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama terima kasih kepada Pak Menteri Pertanian yang sudah memasukan solar cell dan penambahan pupuk organik, terima kasih sekali. Tetapi saya ada catatan, bahwa yang ditulis tadi adalah untuk program-program pupuk pengolahan pupuk organik yang disingkat dengan UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik). Tapi saya mau juga meminta yang 100 miliar itu dislipkan juga pupuk organik cair atau POC, karena tidak semua para peteni itu suka yang berat-berat, mereka maunya yang ringan-ringan saja. Kalau yang pupuk ini itu dari kotoran Sapi dan dicampur dengan beberapa campuran menjadi pupuk organik, tapi kalau POC ini tidak, dia dari beberapa bahan yang sudah diteliti oleh Litbang dan ini sungguh luar biasa manfaatnya, satu hektar itu cukup dengan 2 litter saja. 2 litter saja itu cukup 1 hektar. Tolong dimasukan nanti POC nya di yang 100 miliar. Itu pertama.

Yang kedua, untuk Pupuk Indonesia, saya sudah catat tadi bahwa tidak berubah, tetap untuk subsidi organik itu 720 ribu ton dengan harga 1,1 triliun. Tidak tergambar disana apakah ada juga POC nya. Kami berharap Pak Menteri di dalam 1,1 triliun itu dimasukan POC di dalam. Kita mendidik masyarakat atau petani beralih ke organik, kapan lagi kita mulai kalau tidak dari sekarang. Harus dari sekarang kita mulai. Kalau tidak tanah kita ini akan gersang, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang aka datang, anak cucu kita tidak bisa lagi bertani, karena tanahnya suah rusak. Oleh karena itu Pak Menteri mohon bantuan Pak. Saya mau menyampaikan saja ini, nadanya memang begitu. Saya ini hanya menyampaikan saja untuk anak cucu kita kedepan, sesuai dengan Pak Hermantoh bilang, supaya kita tidak ditanyak di Akhirat oleh Allah. Ya Pak Hermantoh ya. Ya Pak Menteri. Mohon maaf Pak Menteri. Solar cell saya alhamdulillah sudah dimasukan, nanti kita akan coba di tanah-tanah yang kering, yang mataharinya bahwa memang cukup trik, kita pakai solal cell untuk memompa air.

LHK saya berulangkali sampaikan kepada Ibu Dirjen Lingkungan Hidup, sampah. Ibu sekarang sudah ada teknlogi sampah yang tidak perlu lagi dipilah. Tapi saya tadi tidak lihat anggarannya untuk itu. Tolong ada teknology terbarukan sekarang mengelola sampah tidak perlu lagi dipisah, cukup dikumpulkan, setelah itu proses

menjadi air bersih, yang kedua mendapatkan tenaga listrik. Kita bisa dari Jerman. Ada bu, nanti bisa kita persentasi dengan Ibu melalui Jerman, dia bisa datang kesini, tidak perlu lagi dipilah-pilah, cukup dikumpulkan sampah laut, sampah pasar, sampah hutan menjadi satu nanti ada teknologi terbaru, yang penting ada air. Itu yang penting, ada air atau air laut. Bisa menghasilkan air bersih dan menghasilkan tenaga listrik. Luar biasa itu bu teknologinya. Jangan yang ecek-ecek lagi lagilah, jangan, habislah anggaran kita untuk itu.

Itu saja Pak Ketua.

Yang terakhir Planology Pak. Mohon bantuannya Pak, jangan sampai tumpang tindih lagi seperti di Kalimantan Tengah, empat kali sudah dipanggil Gubernurnya tidak datang sampai sekarang, tidak ada penghargaan terhadap Komisi IX. Saya sampaikan kepada Ketua, tiga kali kita sudah undang beliau, tapi sampai saat ini tidak ada beliau menghormati kita sebagai anggota DPR-RI. Begitu Pak Sudin, sudah berapa kali, empat kali. Tolong Pak sebelum berakhir masa bakti kita, beliau dihadirkan. Potensi kerugian negara menurut Pak Darori 380 triliun, belum termasuk pajak di dalamnya dan itu tidak sedikit uangnya. 380 triliun kerugian negara yang ada di Kalimantan Tengah belum termasuk pajak di dalamnya. Oleh karena itu Ketua, Pimpinan Sidang yang berbahagia, tolong diundang sekali lagi, kalau tidak berkemungkinan Komisi IV akan menyerahkan kepada yang berwajib atau langsung Surat ke Presiden.

Terima kasih.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wal Afwu Minkum

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Klarifikasi dulu Pak.

Itu Undangan ke Gubernur Kalteng baru dua kali, belum ke tiga kali, kita tidak mau rencana undang yang ketiga, karena kita mau mengambil keputusan langsung di komisi ini untuk mencabut semua ijin-ijin yang bermasalah di sana. Jadi tidak perlu lagi kita mengundang, kita akan minta keputusannya untuk mencabut lewat Planology. Sudah waktu itu dengan Raker Menteri.

Baik Pak Menteri, mungkin Pak Sekjen menjelaskan dari yang keputusannya dulu, tadi yang ditanya Pak Sudin.

BAMBANG SUPIJANTO (SEKJEN LHK):

Terima kasih Pimpinan Komisi IV

Yang kami hormati Pak Sudin, atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tentunya saya akan menjelaskan tentang tidak atau tidak jadinya Pimpinan dan Anggota Komisi IV menghadiri kegiatan di Kosta Rika.

Sesuai rencana 2019 Pimpinan dan Pak Sudin, memang kegiatan untuk ke Kosta Rika ini merupakan salah satu kegiatan penting dalam rangka untuk memberikan sebuah wacana, ketika kita akan melakukan sebuah revisi untuk Undang-Undang 5 Tahun 90 rekan-rekan konservasi dan Sumber Daya Alam dan keanekaragaman hayati. Dan salah satu kegiatan yang kami siapkan yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang kelola kawasan konservasi di negara lain dan Kosta Rika termasuk yang kami jadwalkan. Proses ini dari awal tahun Pimpinan dan Pak Sudin, dan kami memang dengan niat yang tulus mengundang Pimpinan dan Anggota Komisi IV. Sepertinya halnya kegiatan-kegiatan yang lain yang memang dilakukan oleh KLHK di dalam rangka kerja sama internasional dan ketika kegiatan ini sudah kami siapkan semuanya proses dan sebagainya. Seperti biasa ijin Pimpinan dan Pak Sudin yang kami hormati. Prosesnya sudah terbangun sistem untuk kami melaporkan kepada Pimpinan KPK yang mana dalam hal ini selama dua tiga tahun terakhir ini, kami selalu mendapatkan respon yang positif, ketika kita melakukan kegiatan ke luar negeri untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dan tentunya dalam rangka kegiatan yang sangat prioritas. Dan kami jujur dalam kegiatan ini yang dijadwalkan berangkat adalah Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Eko Sistem Eselon II dan Eselon III yang dalam hal ini. Dan kami mengundang Pimpinan dan Anggota Komisi IV, sepertinya halnya biasa yang kami lakukan. Dan prosedur semua sudah kami ikuti, perencanaan penganggaran juga kami sesuaikan untuk adanya revisi dan sebagainya dan ketika kami siap pada seminggu sebelum acara.

Ada surat dari Pimpinan KPK yang memberikan informasi kepada Sekjen, bahwa prinsipnya kegiatan di Kosta Rika ini sangat mendukung untuk kegiatan prioritas yang memang sudah direncanakan KLHK. Tapi disitu disebutkan, ketika harus menyertakan untuk Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR-RI, disebutkan disitu bisa dengan catatan menggunakan anggaran dari masing-masing, artinya dengan anggaran dari tentunya DPR dan dalam hal ini pimpinan yang tentunya sudah diharapkan ada. Nah setelah kami konfirmasi, kami sudah lapor pimpinan pada saat itu dan ternyata memang, mohon ijin dan mohon maaf, karena ini mendesak. Kami juga menyadari pasti DPR juga tidak ada alokasi, karena ini niat kami yang mengajak. Sehingga pada saat itu sudah arahan bahwa ketersediaan anggaran di DPR itu tidak ada dan kami membuat surat pimpinan mohon ijin bahwa kegiatan kami tetap dilaksanakan ke Kosta Rika dan tetap memberangkatkan Eselon I, Eselon II dan Eselon III, IV yang terkait, karena ini memang sesuai dengan rencana.

Dan tentunya kami mohon maaf Pimpinan dan Pak Sudin, atas ketidaknyamanan ini, karena kita tentunya tidak ingin berbeda di dalam prosedur untuk memberangkatkan tugas keluar negeri ketika kami mengundang atau melibatkan dari komisi, seperti halnya yang sudah kita lakukan setiap ada kegiatan COP. Setiap akhir tahun termasuk tahun ini juga tetap mempersiapkan, tapi tentunya sebagai Aparatur Sipil Negara. Setelah ada arahan dari KPK tidak ada unsur apa-apa. Memang arahannya seperti itu, sehingga kami kembali kepada rencana tidak mengikutsertakan

dari DPR Pak Sudin. Jadi tentunya atas hal-hal seperti ini kami mohon maaf. Dan menjadi catatan, memang tentunya ditanyakan loh kok dilaporkan kepada KPK, justeru dalam pencegahan korupsi sesuai Perpres 54, kami termasuk yang sudah menjadi salah satu bagian yang bisa diharapkan lebih cepat untuk pencapaiannya dan nampaknya memang untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sehingga kita sangat menjalankan apa yang diminta oleh surat di dalam bunyinya seperti itu. Sekalagi lagi kegiatan ini tetap berjalan Pimpinan, Pak Sudin, tapi ketika memang akan mengikuti sertakan, itu diharapkan bisa dibiayai oleh instansi masing-masing. Jadi bukan berarti ada hambatan atau larangan dalam kaitan kegiatan prioritas ini.

Itu penjelasan kami, tentunya dihadapan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR-RI, saya atas nama Menteri LHK dalam kesempatan ini mohon maaf lahir dan batin atas tidak jadinya kegiatan ini mengikutsertakan anggota, tapi pencapaian kami untuk jadi bahan revisi Undang-Undang 5 tahun 1990, teman-teman di KLHK sudah memperoleh hasilnya.

Saya rasa itu Pak Sudin, kembali ke Pak Sudin mohon arahan.

F-PDIP (SUDIN, SE.):

Pimpinan maksud saya begini, apapun dilaporkan ke KPK itu wajib, karena itu uang negara yang harus dipertanggung jawabkan. Tetapi yang saya perlu saya masalahkan, dua hari sebelum keberangkatan, waktu itu saya rencana mau keluar negeri juga, akhirnya saya batalkan, tiket sudah saya beli. Ini yang lho terjadi. Kok tidak sepertinya tidak ada planning. Tadi ada katakan dari awal tahun sudah dibuat perencanaan. Harusnya akhir awal dilaporkan dong, bahwa kami akan mengajak ini, oh ternyata tidak boleh, sudah. Jangan dua hari menjelang keberangkatan, tiba-tiba ini. Ia wajarlah kalau Indonesia kebarakan ketua, karena Kementerian LHK begitu, apa-apa mendadak. Jadi kebakaran dulu baru nanti cari air, kalau selangnya tidak ada, beli dulu di Kota.

Itu saja dulu Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.
Selanjutnya.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Pimpinan, saya sedikit, bisa interupsi tidak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum Warrhmatullahi Wabarakatuh.

Jadi saya tadi berharap Ibu Menteri LHK datang ya, tapi ternyata ada rapat tempat lain ya Pak Sekjen ya. Oke Pak, jadi begini. Sebagai mitra Komisi IV, saya melihat LHK ini belum kelihatan fungsinya dalam masalah kebakaran hutan. Jadi yang muncul di publik itu BNPB. Nah kita Humasnya LHK ini bagaimana kerjanya begitu. Anggaran sendiri Dirjen Pengendalian Perumahan Iklim, anggarannya tidak sampai 200 miliar. Jadi padahal kebakaran hutan ini setiap tahun terjadi begitu. Harusnya kita bisa mempersiapkan bahwa tahun depan musim kemarau pasti ada kebakaran hutan lahan itu. Kenapa tidak disiapkan anggaran yang besar. Ini saya bicara anggaran ketua, karena kita bicara masalah anggaran 2020 itu. Jadi saya tidak mau melihat, dibandingkan pertanian, pertanian lumayanlah humasnya itu muncul dipublik bahwa kerjanya ini lho 1, 2, 3. Saya tidak lihat saya di media pun bicara apa yang sudah dilakukan oleh kehutanan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, tidak ada, anggaran kita berikan apa dong humas. Ia jadi masukan saja Pak Sekjen, karena saya kecewa, saya jadi beberapa kali ditanya wartawan televisi, radio wawancara, apa perenanan Kementerian Kehutanan, BNPB oke dia sudah walaupun terlambat, tapi sekarang kalau kebakaran luar biasa, bahkan terburuk sepanjang sejarah, ia satu juga orang di Riau terpapar asap, di Malaysia, Singapura komplain. Kita Komisi IV ketua bagaimana langkah kita itu. Nah oleh karena itu Pak ketua, saya berharap Pak Sekjen bisa dibicarakan, tambah anggarannya ini, kalau memang bermasalah begitu ya. Kalau masalah personilnya memang disana kurang, tambah orangnya dan sampai publik ini lho kerjanya kehutanan dari preventif, pencegahannya kemudian pada saat kebakarannya. Jadi orang tahu ini kerjanya. Sebagai mitra Komisi IV kita kecewa juga kalau tidak terdengar di publik itu, sehingga masyarakat apa peran Komisinya IV mengawasi, memberikan anggaran kepada Kementerian Kehutanan.

Itu saja Pak Ketua, jadi perhatian ini masalah kebakaran ini, ini suatu yang sangat penting dan masyarakat kita dan jutaan orang yang mendapatkan masalah dengan kebakaran ini.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Darori silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, MM.):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Pak Ketua, teman-teman anggota,
Pak Sudin yang terhormat,
Pak Menteri, teman-teman Eselon I yang kami hormati,**

Tadi teman-teman sudah menyampaikan apa yang telah terjadi pada situasi sekarang. Saya sudah hampir mungkin ini tahun ke lima setiap Rapat RDP dengan teman-teman eselon I, selalu mengingatkan jangan mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan dan yang sudah baik kita lanjutkan, tapi terbalik Pak Menteri, justeru yang baik ditinggalkan yang tidak baik dilanjutkan. Saya ini agak sedih Pak Menteri, saya duduk mendampingi Pak Menteri 38 tahun lho Pak Menteri, duduk disini sendirian, tadinya ada 12 orang yang mencalonkan, hanya 2 yang menjadi orang kehutanan Pak Menteri. Tumpuhannya kesaya ini, karena tumpuhannya kesaya, saya limpahkan kepada teman-teman di LHK.

Saya ditanya oleh orang TNI dan Polri, kebakaran hutan ini tanggung jawab Tentara atau Polisi Pak, kenapa kalau salah kami yang dipecat, waduh, saya tidak bisa menjawab. Kebakaran hutan itu tanggung jawab siapa Pak, ini Jenderal yang menelepon. Kalau saya salah kok kebakaran kok kami yang dipecat oleh Presiden itu. Mungkin Presiden kurang informasi ini Pak, walaupun Presidennya orang kehutanannya juga. Jadi begini Pak Menteri, kenapa saya hampir 7 tahun Pak jadi Dirjen Pengendalian Kebakaran Pak, saya tidak pernah lihat Api Pak, kenapa bisa, jangankan Presiden, Panglima, Kapolri, Menteri pun tidak hampir katakan itu. Ini ada teorinya yang kami lakukan bahwa kita harus tegas melaksanakan Undang-Undang. Pada tahun 2015 seorang pengusaha besar yang punya kebun 50 hektar, dihukum 8 tahun Pak, akhirnya Jampidsusnya Pak Hendarman Supandji jadi Jaksa Agung, seorang Kapolda Sumatera Utara Bambang Hendarso Danuri dia jadi menonaktifkan HPH dia jadi Kapolri, pada saat itu saya Dirjen Pak dan kami dibackup oleh KPK oleh Pak Busro. Dari situ orang takut, kita kalau kebun tanpa ijin 8 tahun, ditindaklanjuti permintaan Komisi IV pada waktu itu Pak Sudin SC yang marah-marah kepada saya, ia makanya saya berani bicara. Mengatakan minta data-data pelanggaran di bidang kehutanan untuk kebun dan tambang tidak prosedur. Saya dulu disitu Pak. Kalau Komisi IV sekarang saya kira agak baik Pak, dulu waktu kalau marah-marah, ngeri Pak. Agak baik, tidak baik juga tidaklah.

Saya minta kepada Gubernur semua hampir katakan tidak bisa memberikan, karena waktu itu otonomi. Ini saya cerita sedikit. Alhamdulillah atas ijin Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua KPK kami rapat membentuk tim Pak. Tim penertiban penggunaan..... prosedur. Di 8 Provinsi ke Kalimantan, Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Sulawesi Tenggara. Kita menemukan Pak 770 perusahaan kebun seluas 8,3 juta hektar tanpa ijin Pak dan denda kayunya 362 triliun itu dihitung oleh Litbang Kehutanan. Itu 2012. 2013 saya mengundurkan diri Pak, mencalon DPR, ini tindaklanjut.

Nah DPR Komisi IV inisiatif Pak membangun Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan penegakkan hukum di bidang kehutanan. Di sana sangat keras sekali Pak Menteri, korporasi yang buka kebun tanpa ijin dipidana minimal 20 tahun, maksimal seumur hidup dan denda 1 triliun. Yang menarik lagi Pak, bagi pejabat yang lali tidak melaksanakan tugas ini, dikenakan pidana 10 tahun. Ini tolong hati-hati teman-teman ini. Pejabat yang lalai kena pidana. Ini tidak dilaksanakan. Jadi selama kami Dirjen karena 8 tahun itu takut semua tiarap Pak, kebun-kebun ini. Nah

sekarang kok luar biasa, sampai Panglima/Kapolri turun. Dulu jangankan Menteri Pak, Dirjen saja tidak turun, 8 tahun saya Pak, uangnya saya kembalikan karena tidak ada kebakaran, kemarau tetap kemarau itu.

Nah yang saya minta juga kepada penegak hukum ini ya, kita punya Undang-Undang 41 sudah jelas, melanggar membakar hutan itu sudah jelas 15 tahun Pasal 78, kalau tidak sengaja 5 tahun, kenapa pakai peraturan denda-denda, itu tidak akan dibayar, pidananya saja. Nah inilah yang saya minta kepada teman-teman, jangan mengulangi kesalahan yang salah, kedepan ini 5 tahun lagi yang ini, ini kemarau masih 2 bulan lagi, mau diapakan. Seluruh penermbangan ini berhenti, yang tidak enak kami semua ke saya itu, Komisi IV tidur saja, bagaimana itu. Ini tolong kepada teman-teman. Nah ini terkait kepada Pak Menteri Pertanian Pak, soal kemarau ini Pak. Bapak membangun bendungan, membangun saluran tersier-skunder, tapi waduknya itu tidak pernah dipelihara Pak. Kemarin sama Pak Dirjen, Sekjen kita 2000 yang akan datang 5 tahun kedepan tolong waduk-waduk ini dipelihara, sehingga ada air. Sekarang kemarau kemarin perjalanan darat dari Jogja kesini Pak, bukan kesalahan Bapak, airnya tidak ada dari waduknya. Nah ini koordinasi kedepan tolong diperhatikan, sehingga tidak terulang lagi.

Nah kepada tadi rencana anggaran, saya kira sudah bisa kami pahami Pak, cuma kami mengingatkan kepada teman-teman eselon I, ini waktu tinggal 2 bulan, tolong betul-betul jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik, sehingga terjadi masalah. Maka pada Pak Irjen, tolong ini dimonitor baik Irjen Kehutanan, Irjen Pertanian jangan sampai kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya dua bulan ini masa kritis Pak Menteri, pergantian kabinet tidak tahu Pak Menteri terus atau tetap atau pindah saya tidak mengerti, mudah-mudahan dapat lagi. Aamiin. Ini doa saya, mudah-mudahan terkabul. Jadi ini Pak, yang penting apa yang harus dilakukan ini soal kebakaran ini. Yang paling enak itu mencegah, kalau sudah kebakaran Pak, jarak 100 meter kita tidak bisa memadamkan. Saya 23 Tahun di Sumatera Pak, jadi Kepala Dinas Kabupaten sampai ke Kanwil itu mengalami. Jadi ini pengalaman ini Pak Sekjen, kedepan tolong-tolong teman-teman mulai membuat tiga, empat halaman appa-apa yang sudah dilakukan ibarat masak itu yang dirjen juru masak, yang makan itu menteri, kalau enak menteri, kalau tidak enak biasanya dirjennya yang salah. Apa yang belum dimasak, ini tolong dibuat narasi, sehingga kepada menteri yang baru siapaun yang menjabat, tidak terus jalan bisa melaksanakan tugas selanjutnya.

Demikian Ketua, terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Selanjutnya Pak Rahmad Handoyo.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI, MM.):

Baik,

Bismillahirrohmanirrohim.

Pimpinan dan Ibu-Bapak yang saya hormati,

Saya coba menambahkan apa yang disampaikan isu terkini Ketua, kebakaran. Sebenarnya juga menjadi pertanyaan, itu poksinya siapa ini, begitu Presiden memerintahkan Keamanan, Kepolisian, TNI yang tidak segera beri efek juga kepada kinerjanya terncam Pak. Dua hari yang lalu saya bertemu salah satu Wakapolres di Pulau Jawa, kebakaran hutan juga. Saya cukup terenyuh ketika melihat tiga hari bertempur “ dengan asap” mata itu masih merah, Wakapolres Pak. Yang diperintahkan yang dikerahkan siapa, anak buahnya seluruh Polres. Apa yang ingin saya sampaikan ini, menyambung dari Pak Andi Akmal tadi, kalau mengerti apa yang disampaikan bahwa ini ada sebenarnya rutinitas “kegiatan kita” bahwa setiap tahun mengalami kita kendala kehutanan terbakar. Saya kira perlu dipertimbangkan Pak Dirjen, Pak Sekjen untuk penganggaran penanggulangan kebakaran itu juga harus diperkuat. Kalau toh kemudian sisa tidak, saya kira untuk tahun depan saya kira itu. Jadi itu sekali lagi Pak Sekjen, mohon untuk tahun depan kita harus bersiaga mulai dari sekarang perencanaan dari sekarang.

Bagaimana kita mulai mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana kebakaran ini. Saya kira kalau kita memang anggarannya cukup, ia paling tidak bisa meminimalkan. Apa yang dilakukan dua hari yang lalu, kalau sudah terbakar itu tidak bisa diberhentikan Pak, yang dilakukan oleh teman-teman Kepolisian kemarin itu, mencekat membentengi terjadi hutannya ditebang, biar tidak ada jarak itu ya. Berarti tidak merembet tidak melompat itu ya. Kalau sudah kata kemarin saya diskusi itu. Mas kalau kita sudah jalan saja dengan api bara itu lebih cepat bara apinya. Jadi ketika memerintahkan, jangan dipadamkan itu malah berisiko pada nyawa kalian, sudah buat skat saja jangan sampai kebakaran itu tidak meluap kebawah. Itu satu.

Yang kedua, masalah pembiayaan Pak Sekjen Kehutanan ya. Masalah pembiayaan, saya sampai sekarang mohon konfirmasi, anggaran 2 triliun dana pembiayaan untuk UKM disektor kehutanan, yang kemarin diwacanakan dan mau dijadikan keputusan Presiden untuk diberikan kepada lingkungan, tolong dicabut Pak, kalau belum untuk tidak dilakukan kembali. Kalau seandainya itu tetap dilakukan, seandainya ini kita tidak bisa menjamin, Kementerian itu dengan Kehutanan dengan Lingkungan Hidup dipecah, itu nanti akan melekat pada BLU nya lingkungan hidup itu ya. Padahal itu 2 triliun itu alokasi yang dikumpulkan dari teman-teman kehutanan untuk merevisas masyarakat UKM disekitar itu. Kalau sekarang masih dalam satu atap Kementerian Kehutanan dengan Lingkungan Hidup, tidak ada soal.

Jadi sekali lagi Pak Sekjen untuk disampaikan ke Ibu Menteri. Untuk tidak meneruskan itu rekomendasi dari Kementerian Keuangan agar tidak satukan, kalau boleh silakan buat BLU yang berkaitan dengan pembiayaan UKM terkait dengan

lingkungan, silakan, oh itu memang dikumpulan dari kehutanan untuk memberdayakan masyarakat sekitar disektor kehutanan UKM. Itu Pak Sekjen ya. Nah yang menyangkut dengan Kementerian Pertanian, Pak menteri, saya termasuk yang salah satu konsen pembiayaan Pak Menteri, pembiayaan ini ada banyak ya, dari bank itu perbankan, yang non bank itu bisa juga dengan pemerintah. Nah saya itu sudah berulang kali menyampaikan kepada pihak bahwa petani kita itu butuh pembiayaan. Kalau juga belum memungkinkan untuk saat ini. Bank juga butuh bagaimana membuat proposal, butuh membuat punya agunan yang cukup. Saya mengusulkan teknis Pak untuk jadi bahan pertimbangan tapi jangan jadi beban buat teman-teman sekalian. Mohon dipertimbangkan agar UKM-UKM disektor pertanian atau calon petani atau petani yang belum, pemerintah hadir Pak Menteri.

Saya percaya itu sudah ada pusat pembiayaan. Kementerian Kelautan sebagai salah satu contoh 2 tahun yang lalu mengalokasikan 500 miliar dan 500 miliar itu sampai sekarang debetnya nol persen, tidak masuk akal itu kredit macetnya nol persen kementerian kelautan itu. Tapi luar biasa itu prestasi. Artinya apa, ketika bagaimana membuat anak mudah kita yang mau bisnis kentang, kan tidak bisa lari ke bank tidak bisa Bapak, larinya kepada hadirnya pemerintah disitu. Nah kalau ternyata 100 miliar, 200 miliar nanti 5 tahun lagi itu sudah triliun Pak. Bapak akan menumbuhkan, menciptakan wirausaha-wirausaha di bidang pertanian, entah itu bagaimana beternak kelinci, beternak yang lain.

Jangan banyak-banyak dulu valid projek 100 miliar, 200 miliar yang ternyata itu bisa masuk, ya nanti ranah nanti pemerintah Banggar Pak. Saya teringat ketika kementerian itu LPDB, cuma 100 miliar Pak. Kemudian begitu lahirnya bagus ditangkap oleh Banggar dialokasi 3 triliun Pak. Nah demikian di Kementerian Kehutanan, kalau itu bagus itu bisa dikapitalisasi. Makanya saya teringat pidato Presiden kita, ketika tanggal 16 kemarin, bahwa mengikuti fungsinya, jangan hanya di kementerian itu ada prgram direktur-direktur kemudian dibagi, menghabiskan anggaran. Saya bagaimana fungsinya bagaimana soal jangung, jagung diperkuat, 2020 apa yang diperkuat. Jadi duit itu multifungsinya apa untuk 2020 itu. Jangan menganggarkan pada program yang bukan harus Direktorat Jenderal itu harus diisi semuanya, tidak bisa. Kalau perlu kalau memang tidak diminimalkan saja kalau tidak fungsinya prioritasnya tidak ada.

Jadi singkatnya buat Pak Menteri mohon pertimbangkan jadi analisa, bagaimana agar pemerintah bisa hadir ketika petani-petani kita, calon-calon wirausaha muda kita yang mau usaha belum bisa perbankan, ia disitulah lari kepada Kepala Pusat Pembiayaan. Jadi Kepala Pusat Pembiayaan cuma hanya perbankan KUT, pemerintah juga harus hadir.

Demikian Ketua, terima kasih.

Saya hormat.

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Merdeka.

Selanjutnya Pak Sulaiman Hamzah.
Kami persilakan.

F-NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH.):

Terima kasih Pimpinan dan kawan-kawan anggota yang saya hormati.

Pak Menteri, Pak Sekjen LHK dan hadirin sekalian.

Saya sedikit saja Pak ketua, saya punya masalah di Dapil. Di Papua itu PON 2020 jadi dilaksanakan Pak, kegiatan PON. Nah oleh karena itu saya minta dukungan dari Pak Menteri, mungkin bisa dibantu bibit sayur mayur dan peralatan berupa kultivator. Ini untuk menunjang kebutuhan pada saat kegiatan PON nanti bisa terlaksanakan.

Yang kedua, saya punya masalah juga di Dapil di Merauke. Itu ada penumpukan beras di petani, karena di Bulog sampai saat ini menurut keterangan Kabulog tadi saya telepon, bahwa di sana memang mereka gudangnya tidak mencukupi dan oleh karena itu minta Kabulog juga minta kalau bisa disampaikan ke forum ini. Oleh karena itu di sana memang para petani kesulitan untuk menyalurkan berasnya, di swasta tidak menampung, di Bulog tidak menampung dan mereka yang menggunakan duit bank itu ternyata akhirnya tidak menyicil hutangnya di bank, oleh karena itu ada yang.

BAMBANG SUPIJANTO (SEKJEN LHK):

Ijin Pak Ketua.

Kami tahu detailnya tempatnya, supaya kami bisa tindaklanjuti.

F-NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH.):

Di Merauke Pak, ke Bulog Merauke juga sudah saya konfirmasi tadi dan petani yang mati hutang di bank itu, itu memang kesulitan menyicil hutangnya dan memang ada yang sudah disita bank. Nah mereka minta tolong kesaya untuk sebisa mungkin disampaikan. Barangkali Pak Menteri bisa kasih jalan keluarnya.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Pak Roemkono,
Pak Bagus kami persilakan.

F-PG (AA BAGUS ADI MAHENDRA):

Ya terima kasih Pimpinan.

Jadi yang pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf, karena agak terlambat datang. Yang seterusnya saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan Pak Sekjen Kehutanan. Jadi menyikapi dari hasil diskusi kami di Kantor Bapak kemarin, ada beberapa hal kesimpulan, dalam hal ini bagaimana kehutanan ini bisa mewujudkan satu destinasi pariwisata yang baru. Ada banyak tempat yang susah dijangkau. Nah sekarang bagaimana kita mempermudah, pertama perijinan Pak. Yang kedua adalah bagaimana satu bentuk program nyata terkait dengan kita menyongsong revolusi industri ini, ia harus destinasi-destinasi peserta yang baru terkait dengan pelestarian kehutanan kita. Itu yang pertama Pak. Saya ingin sekali ada bentuk rill kita, karena sementara waktu kita hanya memperkosa alam saja apa adanya, tapi menjaga kelestariannya, alamnya bukan berarti hutan kita tidak bisa diapa-apakan. Tapi perlu juga kita lakukan kegarana modernisasi terkait dengan bagaimana mudahnya itu menjangkau tempat pariwisata itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua Pak, ini anggaran Bapak tinggal 2 bulan lagi. Jangan sampai nanti untuk mempertinggi serapan, jangan paksaan nanti penanaman, bisa mati semua pohon itu. Jadi biarkan saja ke Silpa. Nah nanti kita lakukan pada saat yang tepat. Itu saran saya.

Terus yang selanjutnya kepada Pak Menteri Pertanian, gerakan Bapak sudah sangat bagus. Jadi semua sektor tadi sudah disinggung bagaimana Embung. Jadi ini penting sekali Pak. Sekarang di beberapa daerah seperti di Klungkung Pak, itu bekas galian C Pak. Itu coba Bapak gerakan kesana bukan lahan persawahan baru di sana. Itu akan mampu sekali meningkatkan. Nanti kalau Bapak mau cek lokasinya, mari kita sama-sama. Itu ada potensi Pak, sawah baru di sana. Kalau itu dilaksanakan, kren Pak. Jadi satu hal yang rill bisa kita lakukan di sana yang kemudian irigasinya ini kita permanen Pak. Jadi kalau mau melihat sekarang bantuan irigasi tersier Bapak, nah itu kedepannya seyognya kita harus sudah mulai yang permanen Pak. Sekarang sudah ada cetakan-cetakan yang dijalan-jalan itu yang bentuk U itu Pak, tinggal dipasang saja. Nah itu simpel sekali dan saya rasa itu jauh memeliharanya walaupun kita dari sedikit, sedikit, sedikit kita kedepan ini lebih meningkatkan kepada kualitasnya Pak, walaupun kuantitinya tidak terpenuhi, namun kualitas irigasi itu kita harus jaga, karena air ini sudah mahal sekali sekarang ini. Nah itu kira-kira dari sisi irigasi.

Yang kedua, dari pasca panen Pak. Pasca panen ini penting sekali, di Kakao bagaimana Bapak menjang, kita masih lemah sekali pasca panen kako ini, padahal pengusaha-pengusaha vila itu sudah mau Pak bersinergy. Namun bagaimana kita mempermudah dia bisa membeli mesin dari luar negeri biasanya kenanya di Bea Cukai. Nah kalau Bapak sekarang bisa bantu mesinnya, sudah banyak yang Bapak angkat yang dari proses pasca panen dari kakao itu sendiri. Nah pasca panen pertanian padi, nah itu saya ingin sekali melihat seperti di Korea Pak, Pagi masuk gabah, sore sudah beras. Nah mungkin Bapak bisa komunikasikan dengan Bulog, di dalam dia menjaga pasca panen ini, perlu Pak sinergikan di sana juga ada program,

nah sehingga beban anggaran kita tidak terlalu berat, tapi tugas rampung. Nah tinggal ada satu kesepakatan bersama antara Pertanian dan Bulog terkait dengan penyerapan hasil panen masyarakat yang kemudian implikasinya kepada pengelolaan panen itu sendiri.

Itu kira-kira Pak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Pak Ustad.

F-PPP (ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy.):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Saya sedikit saja Pak, mengenai LHK. Ini keberadaan musim kemarau sekarang ini, kekeringan yang berkepanjangan cukup sangat dirasakan ya, khususnya di Jawa Barat. Saya melihat beberapa sungai yang kurang artinya begini, dibanding dengan tahun-tahun lalu, sekarang ini kurang serius, misalnya sungai Citandui, Citarum dan juga Ciwulan penanganannya kurang serius. Nah saya harap ini bisa lebih serius lagi dengan dibuatkan perbaikan kehutanan nasionalnya dengan bukan saja memberikan bantuan pohon, tapi juga harus dengan pengawasan dan jenis pohonnya. Sekarang ini memang di masyarakat ada gairah untuk menanam, tetapi tidak berorientasi kepada menahan erosi dan juga mampu menahan air. Ia terkadang mereka menanam pohon banyak untuk ditebang lagi. Saya yakin tidak ada di kementerian ini yang khusus program menanam pohon beringin, padahal tidak ada pohon beringin untuk digunakan tempat lain, tetapi kemampuan pohon beringin di dalam mengikat air sangat tinggi sekali. Jadi saya menyarankan ini pertanian, perkebunan ada program menanam pohon beringin, nah itu sebetulnya sangat mudah dilakukan, targetnya adalah menahan, mengikat air itu sendiri.

Kemudian di dapil kami itu ada program bendungan Cikeris Pak, diperbatasan itu di Citandui, itu berada di dua Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasik Malayan. Ini juga sering sekali kebijakan-kebijakannya, terutama dipinggir-pinggir kalinya ini sekarang malah mereka lebih berorientasi kepada masalah wisatanya karena bendungannya. Sementara saya melihat dari pihak kehutanan tidak ada orientasi tentang penanaman-penanaman tadi.

Itu saya Pak yang saya sampaikan. Mengenai penanaman pohon beringin, itu sangat serius, menurut itu sangat bagus sekali sampai-sampai dalam bahasa Sunda itu pohon beringin suka banyak juriknya.

Terima kasih.

Assalamualaikum.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Made Urip, baru Pak Nasir, Pak Efendi setelah itu.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

la terima kasih Pak Ketua,

Rekan-rekan Anggota Komisi IV yang saya hormati,

Tadi sangat menarik dan isu yang pada saat sekarang ini persoalan tentang kebakaran. la saya rasa kira selama ini rutin setiap tahun terjadi kebakaran ini, kalau musim kemarau pasti terjadi kebakaran dimana-mana terjadi kebakaran. Kebakaran hutan itu bukan saja terjadi di Indonesia, di Amerika pun negeri yang begitu canggih juga terjadi kebakaran ini. Nah khusus Ibu Siti Nurbaya Menteri Kehutanan, kan sudah menyampaikan itu di media, di detik.com, bukan tidak menyampaikan, sudah menyampaikan itu tentang kebakaran yang terjadi pada saat sekarang ini, karena betapa lemahnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Padahal kepala daerah itu sebetulnya tugas utamanya, diakan sebagai Satkes di sana kerja sama dengan Polri dan Badan Penanggulangan Bencana. Nah ini jadi yang terjadi pada saat sekarang ini adalah kebakaran hutan yang lebih banyak dilakukan oleh masyarakat dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha. Itu sudah dijelaskan. Nah maka ada kadangkala juga membakar hutan ini dalam rangka untuk membersihkan Lan Clearing itu, karena lebih murah biayanya dibandingkan dengan cara-cara biasa begitu, bahkan dimanfaatkanlah ini oleh sejumlah orang yaitu pada musim kemarau ini dilakukan itu. Nah jadi saya rasa koordinasi ini sangat penting dan sinergi harus dibangun Pak Sekjen khusus untuk jajaran Kementerian Kehutanan ini.

Jadi sara rasa tugas kita bersamalah untuk melakukan ini. Kemudian juga barangkali apa betul-betul serius dilakukan ini jangan sampai terus terutama-terutama hotspot ini, jadi jangan sampai mengganggu negara tetangga kita. Nah ini langkah-langkah strategis itu harus betul-betul dilakukan oleh Kementerian Kehutanan ini. Itu untuk teman-teman di Kehutanan.

Yang kedua, untuk di Kementerian Pertanian. Saya rasa untuk produksi kedelai pada saat sekarang ini belum mencapai target. Jadi kalau kita lihat kebutuhan kita dari dalam negeri hampir 2,3 juta, produksi kita sementara ini hampir hanya sekitar 900 ribu. Nah Pak Menteri sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas kedelai kita, tetapi sampai sekarang ini belum bisa dilakukan maksimal. Nah barangkali bagaimana memotivasi para petani kita ini sekarang untuk meningkatkan produktivitas kedelai kita sehingga kebutuhan dalam negeri kita ini bisa terpenuhi. Jadi kadang-kadang petani mau dia menanam kedelai, tetapi ketika panen harganya jatuh. Nah jadi jangan dibilang petani tidak mau, kemudian nah ini pasca penennya ini harus juga diperhatikan oleh teman-teman di Kementerian Pertanian ini.

Nah terus selanjutnya kemarin kita RDP dengan seluruh jajaran Eselon I Kementerian Pertanian. Banyak keluhan yang disampaikan oleh teman-teman di Komisi IV Ini, terutama berkaitan dengan Alsintan ini, yang sampai saat sekarang belum bisa kita lakukan penyerahan di lapangan. Jadi usulan dengan implementasinya belum menyambung sama sekali, kita usulkan 100, kadang-kadang baru 4 traktor yang sampai di bawah. Nah barangkali ini perlu dikejar sampai dengan Desember ini, karena janji-janji politik ini sudah terlanjur disampaikan baik yang terpilih maupun tidak terpilih ini. Yang tidak terpilihpun juga menagih janji ini. Barangkali ini perlu direspon oleh Pak Menteri mengenai Alsintan ini.

Nah selanjutnya, kemarin kita melakukan kunjungan spesifik ke Jawa Timur, yaitu melihat pelaksanaan Kartu Tani dan itu Jawa Timur itu sebagai salah satu proyek tentang Kartu Tani ini, ternyata pelaksanaannya di lapangan cukup bagus. Dan ada juga survey sebelum dan sesudah dia Kartu Tani ini. Enamtepat pupuk ini bisa kita capai, kecuali yaitu tepat waktu ini yang belum dengan penggunaan Kartu Tani. Barangkali ini perlu dikejar oleh Pak Menteri, bagaimana 6 tepat ini bisa tercapai dengan penggunaan Kartu Tani ini. Jawa Timur itu sudah mulai cukup bagus walaupun banyak kekuarangan dari alokasi yang diusulkan oleh teman-teman di Jawa Timur itu.

Barangkali itu Pak Ketua dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak-Ibu sekalian.

Sebelum kita lanjutkan dengan penanya-penanya selanjutnya, kita tadi harusnya mengakhiri Pukul 12.00, kita perpanjang ya sampai Pukul 01.00, mudah-mudahan Pukul 01.00 selesai, karena Jam satu juga kita ada undangan peripurna. Untuk itu kami tetap persilakan bagi penanya mohon kalau bisa diefektifkan waktunya. Kami persilakan pak Nasir Umar, setelah Pak Nasir Umar Pak Efendi Sianipar. Kami persilakan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, SH.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian,
Bapak Sekjen KLH,
Para Pimpinan dimasing-masing Kementerian,**

Saya hanya ingin meluruskan kepada penyampaian Pak Darori, bahwa untuk bendung dan jaringan irigasi ataupun bendungan itu adalah tanggung jawab dari Kementerian PUPR, jadi tidak boleh dikaitkan dengan Kementerian Pertanian, karena Pertanian itu hanya menangani perbaikan irigasi tersier, pembangunan embung, pembangunan pompanisasi, long storage itu tanggung jawab dari Kementerian Pertanian. Yang pun nilainya itu di bawah 200 juta dengan pendudukan langsung kekelompok tani. Ini saya luruskan saja, jangan sampai teman-teman ini melihat bahwa ada kemarau yang disalahkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian tidak bisa apa-apa kalau terkait dengan bendungan dan jaringan irigasi, itu tanggung jawab Kementerian PUPR.

Kemudian saya terus terang saja, Kementerian Pertanian ini luar biasa ini bantuannya kemasyarakat petani. Kalau bisa diinventarisasi Pak, itu kan embung itu ada arealnya, minimal 10 sampai 20 hektar. Pompanisasi ada arealnya ya, long storage ada arealnya itu kalau diinventarisasi, itu dikumpul sudah ribuan hektar itu Pak, luar biasa itu. Nah itu yang perlu diinventarisasi diketahui berapa hasilnya, berapa ton perhektar. Selama ini Bapak hanya membangun saja tidak diinventarisasi, karena air yang ada di desa-desa, di dusun-dusun itu lebih dasyat, airnya tidak akan berkurang ya, beda dengan bendungan, musim kemarau seperti Jati Luhur, bendungan-bendungan besar lainnya, pada musim kemarau itu menyusut. Kemudian Kementerian Pertanian ada juga pembangunan sumur bor, itu sangat membantu Pak, walaupun arealnya sangat sempit ya, kecil, 5 sampai 10 hektar, tapi itu sangat membantu.

Kemudian terus terang saja Pak, dengan adanya bantuan dari Kementerian Pertanian dalam bentuk pemberian bantuan bentuk dryer baik yang 30 ton perjam, ada 10 ton perjam, ini membuat Bulog ini kewalahan sekarang Pak. Di Maros itu pemilik penggilingan padi mau menjual berasnya, Bulognya tidak punya duit, tidak semua ya. Karena keberhasilan pada saat musim hujan, dryernya berfungsi 30 ton perjam, sehingga hasilnya itu sangat besar, sementara kemampuan Bulog menyerap padi masyarakat ini tidak mampu. Kenapa Bulog tidak mampu, karena pola atau sistem yang dibuat sekarang bukan debirokratisasi memperpendek birokrasi, maka sekarang jadi panjang. Dulu itu Bulog beli dari petani beras atau gabah langsung diserahkan kekelurahan atau ke desa, langsung dibagi kemasyarakat miskin. Sekarang ini berputar dulu, ada e-warung yang dikelola oleh kementerian sosial, dengan menggunakan kartu melibatkan lagi bank-bank yang ada di Indonesia. Bagaimana pakai kartu orang yang tinggal di dusun-dusun, anggaranya Cuma 110 ribu Pak Menteri, naik angkot saja sudah habis 50 ribu, sisa 60 ribu, yang tadinya 15 kg, sekarang hanya 5 kg Pak, bayangkan itu, sasaran utamanya adalah rakyat, kenapa harus diputar-putar. Yang tadinya Bulog bisa membeli langsung 3 juta ton/tahun bisa dibagi langsung kepada masyarakat miskin, sekarang berputar dulu. Kementerian Sosial ada 6 triliun kalau tidak salah.

Kemudian e-warung ini membeli juga beras kepada masyarakat umum, harganya lebih tinggi Pak. Untuk apa ada kartu. Saya sudah sampaikan kemarin Makasar dengan Kementerian Sosial, Kanwil Sosial di sana dengan Pak Backhtiar mantan Pangdam sebagai Direktur Bulog. Ini keliru. Sebaiknya dikembalikan lagi,

sehingga penyerapan beras oleh Bulog terhadap hasil dari pada masyarakat petani kita itu bisa cepat, tidak mutar-mutar dulu. Kemudian harganya pun tergantung harga pasar. E-warung itu harganya tinggi Pak, dia beli kemasyarakat kemudian dia jual dengan menggunakan kartu. Kartu ini hanya pada daerah-daerah yang ada bank, kalau yang di dusun mana bisa, mereka harus naik angkot dulu, itu biayanya sudah 50 ribu, sementara bantuannya itu hanya 110 ribu, sisa 60 ribu, tinggal 5 kg, belum lagi ambil telur, ambil apa macam-macam kebutuhan yang disiapkan oleh e-warung. Padahal tidak perlu, masyarakat petani itu masyarakat miskin itu cukup dengan beras saja, telur banyak Pak di rumahnya, tidak perlu. Ini pompanisasi. Pompanisasi di Kementerian Pertanian Pak luar biasa. Sedikit lagi Pak.

Di Bone itu Pak di kampung saja, di kampungnya juga Pak Menteri, itu ada pompanisasi satu desa Pak, itu kami naikan air kira-kira 60 meter, dua tahap, diisap naik, kemudian dibuatkan bak lagi, diisap lagi naik. Sekarang itu sudah tiga kali panen Pak. Pompanisasi. Ini kalau dikembangkan terus Pak luar biasa, karena di sana itu adanya daerah Irigasi Sanrego 90 ribu hektar, tapi berseberangan sungai disebelahnya itu tidak dapat lagi air, karena tidak masuk cakupan areal irigasi, sehingga dengan pompanisasi yang tadinya satu kali panen bisa tiga kali panen, termasuk embung, termasuk luar biasa Pak. Sebenarnya ini bantuan Kementerian Pertanian luar biasa, tapi mohon maaf, begitu banyak bantuan kepada saya sebagai anggota DPR, sehingga apa yang diberikan itu, itu sangat bermanfaat kepada masyarakat, luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Menteri dengan jajarannya, walaupun saya tidak terpilih kembali, tapi saya bahagia karena apa yang Bapak berikan kepada saya, itu kami sudah berikan semua kepada masyarakat dan dinikmati dengan baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.

Kemudian ini mungkin ada salah satu, mungkin salah koordinasi barangkali menurut saya, ini ada optimalisasi lahan dari Dirjen PSP 100 hektar 435 miliar, tetapi ditanaman pangan itu pengembangan padi rawa itu ada 400 ribu hektar. Mudah-mudahan tidak ya, nanti bisa dijelaskan. Maksud saya sudah diperbaiki 100 ribu hektar, kemudian untuk membantu supaya ini berhasil hasil pengembangan rawa ini, dari Dirjen Tanaman Pangan itu, kok luasnya lebih tinggi dari pada yang direhab. Ini yang perlu mungkin Pak Dirjen Tanaman Pangan atau Dirjen PSP. Itu saja Pak.

Terima kasih.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Selanjutnya Pak Efendi Sianipar.

F-PDIP (Ir. EFFENDY SIANIPAR):

Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan Komisi IV dan juga yang saya hormati Bapak Menteri dan rekan-rekan Eselon I,

Kebetulan saya pertama kepada pihak kehutanan, bahwa saya berasal dari Riau dan di Riau itu sudah benar-benar menjadi darurat, darurat memang benar-benar Pak. Jarak pandang pesawat saja kemarin saya kesana, tinggal 500 tidak mungkin mendarat terpaksa ke Palembang dan masyarakat di sana sudah sampai diliburkan, tentu ini sudah menjadi prioritas yang sangat mendesak menurut saya Pak. Tapi saya melihat saya sering bertemu dengan Camat, kira-kira dari saya perlulah Kementerian Kehutanan, mengumpulkan semua Lurah, mengumpulkan semua Camat, mengumpulkan Kepala Daerah biar satu visi dalam penanggulangan kebakaran. Saya kira kebakaran ini bukan hal yang baru di Riau, sudah setiap tahun kita baru kemarin ada 6 bulan, tidak ada kebakaran kita sudah bangga menyatakan bahwa Riau bebas asap. Tapi ternyata memang tentu penanggulangannya saya kira dari mulai sekarang kita sudah buat planning walaupun ini tapi kita mengansumsikan bahwa setiap tahun ada kebakaran Pak. Jadi kita lari kepenanggulangan pencegahan. Saya kira pencegahan yang paling efektif adalah kalau lurah, kepala desa turut serta memberikan sosialisasi karena ada saya lihat cela di dalam Undang-Undang 2 hektar itu bisa dibakar Pak, jadi dia main di 2 hektar ini supaya ini benar-benar diawasi oleh kepala desa dan ini inisiatornya adalah kehutanan.

Kedua, masyarakat disekitar kehutanan jadi mata dan telinga dari pada kehutanan Pak. Bagaimana pemikiran kehutanan biar masyarakat disekitar, menjadi mata dan telinga, orang kehutanan yang bisa langsung berkoordinasi dengan Bupati atau Camat atau Kepala Desa. Tentu ada program-program yang kita siapkan yang mempererat silaturahmi kita dengan pejabat-pejabat ditingkat kecamatan dan tingkat kabupaten ini. Nah kalau dinas pertanian, saya kira menurut setelah saya menjadi anggota DPR 2014 sampai 2017, kesannya sangat baik dengan program-program yang kita dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Tapi 2018 saya dikejar-kejar lagi Pak, karena tidak ada yang turun program, turunnyapun paling nanti akhir tahun ini. Jadi sekarang saya kira apa yang dibuat oleh Kementerian Pertanian tentang program itu sudah cukup baik dan masyarakat Riau relatif menurut saya puas yang dibuktikan dengan terpilihnya saya Pak dan juga sanga disanjung di sana Kementerian Pertanian, karena saya digelar di sana penyambung lidah Kementerian Perntanian Pak.

Kedua Pak, kita pernah membuat pertemuan dengan Gubernur dengan Dirut PTPN dengan KUD-KUD seluruh Riau, untuk melakukan replanting dan perbaikan sarana dan prasarana pertanian dan pada waktu itu ada Pak Inal, waktu masih dirjennya Pak Bambang, nah sekarang realisasi dari pada ini tidak ada Pak, karena sudah banyak yang kita rekomtek, ternyata pembayarannya terlambat, sehingga dinyatakan juga pemerintah pembohong Pak, karena rakyat ini gambang saja Pak, asal saja kita sudah mulai langsung dia bilang pembohong Pak. Jadi saya minta kepada Pak Menteri, supaya kita mulai lagi lanjutan dari Pak Bambang itu dan Gubernur sangat mendukung karena kita bisa panggil, Pak saya sudah hubungi juga BPPKS dan mereka siap juga bertemu dengan kita untuk membicarakan yang sudah rekomtek saja Pak, ada sektitar 16 ribu hektar kalau tidak salah Pak yang sudah

direkomtek supaya kita tuntaskan ini Pak, karena saya lihat BPPKS ini ada kemuannya untuk turut bersama-sama dengan kita. Soal teknis saya kira bukan urusan saya adalah urusan pertanian.

Yang terakhir Pak, kalau saya ke daerah selalu saya buat surat laporan ke Kementerian perlu ini di daerah ini, saya minta tolong dijawab ada atau tidak ada atau bisa dimasukan program itu karena itu saya terima langsung dari rakyat, yang paling banyak adalah entraktor, sapi ini, saya harus menampung tidak bisa saya menyangkal permintaan Pak, ia saya salurkan ke Kementerian. Kementerian mohon dijawab suratnya bisa nanti saya kasih tahu surat Bapak aspirasi Bapak sudah saya sampaikan, tapi kondisi dari kementerian seperti ini. Tapi kalau Riau saya kira dipertahankan saja program yang 2014 sampai 2017 itu Pak, sangat efektif buat petani dan mulai ada rasa kebanggaan bagi petani menjadi petani karena dia memakai alat berat dan buat saya tadi Pak, karena saya adalah viar-viar dari negara, viar dari kementerian saya Pak. Jadi tolong Pak diperhatikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Bapak-Ibu sekalian.

Demikian pendalaman dari anggota, saya pikir sebelum ke Pak Menteri, Pak Daniel Johan, oh Pak Irwan masih.

Silakan Pak Irwan.

F-PAN (M. IRWAN ZULFIKAR, M.B.A.):

Terima kasih Ketua.

Langsung saja mungkin.

Saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Menteri Pertanian, karena aspirasi kami kemarin waktu Raker terakhir, dimana saya lihat sekarang sudah dicantumkan soal bagaimana SMD itu dianggarkan untuk tahun 2020. Saya pikir ini suatu penghargaan kita buat sarjana yang ingin membangun desa.

Kemudian yang kedua, sekaligus berharap Pak Mentan bisa melobby ke Menteri PU, agar bendungan yang sedang dibangun bendungan kelara Pak Menteri Jeneponto. Itu bisa kembali dianggarkan agar cepat selesai di tahun 2020, karena kalau proyek ini bisa jalan, saya sangat yakin karena ini informasi juga dari dinas pertanian, bahwa Kabupaten Jeneponto sebagai daerah termiskin di Sulawesi Selatan, dimana cuma bisa memproduksi satu kali, tapi dengan adanya bendungan itu nanti, itu bisa tiga kali panen Pak Menteri.

Saya pikir itu saja, terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI, MM.):

Ketua satu menit ketua, satu menit saya.

KETUA RAPAT:

Kebanyakan dua menit,

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI, MM.):

Terima kasih.

Ada yang ketinggalan, kemarin kami Lampung Pak Dirjen Kehutanan Pak Sekjen, di sana kok saya kira butuh alat untuk operasional Kapal Speed Boat Pak Dirjen, karena di sana ternyata kemarin kita dilalui sesuatu hal yang membutuhkan pengawasan, saya kira mohon dipertimbangkan untuk fungsi kontrol berupa alat Kapal Speed Boat itu bisa bahan pertimbangan untuk 2020 ini. Satu.

Yang kedua, ini walaupun bukan anggaran, tapi masalah curhat saya, ketika bertemu beberapa karyawan BUMN di Pertanian Pak Menteri. Tingkat kesejahteraan BUMN Pertanian saya sedih Pak Menteri. Ada BUMN karyawan disektot pertanian BUMN nya gajinya beda jauh dengan pupuk atau yang lain. Pesan saya yang ingin saya sampaikan kepada dalam porum terhormat meskipun bukan dalam anggaran, tapi fungsi pengawasan, mohonlah itu kementerian bisa menginisiasi bagaiman agar BUMN-BUMN di pupuk, petani, sang hyang seri dan yang lain itu bersinergilah. Jadi biar gajian petani, sang hyang seri itu juga jangan sampai mohon maaf, Ya Allah ya Rob, kadang-kadang belum tentu gajian itu lho. Jadi mohon sinerginya antara itu bisa lebih hidup lagi. Kalau distribusi pupuk ya dikasih alokasi yang baiklah. Yang jelas saya tidak kemana-mana, paling tidak ikut berkontribusi membantu tingkat kesejahteraan ketika ada yang sudah cukup bagus ada yang belum. Nanti akan kita coba evaluasi di dalam fungsi pengawasan Pak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ia sebelum ke Pak Johan, saya ingin menambahkan yang Pak Rahmad Handoyo, karena yang memimpin kemarin saya ke Lampung Selatan Pak. Selain dari lingkungan hidup dan kehutanan juga KKP, Kementerian Pertanian memang kita tidak undang, tapi saya prinsip ada masukan dari Bupati tentang lahan untuk pembangunan lahan jagung, mereka siap untuk melaksanakan program Bapak, kalau mungkin Bapak bisa survey. Jadi ada pulau satu pulau namanya Pulau Sebesi. Pulau Sebesi ini atau pulau yang kemarin waktu kena Tsunami, sampai sekarang masih butuh pemulihan. Mungkin perlu kehadiran Kementerian Pertanian juga membantu alat-alat mesin pertanian. Kami menjanjikan kemarin melalui kelompoknya, mana

yang kita bisa bantu, jumlahnya tergantung nanti kebutuhan disana, karena cukup banya masyarakat yang bercocok tanam di sana. Bisa dari hortikultura, bisa jagi dari persawahannya.

Kemudian tadi yang tentang kapal speed boat itu adalah kapal untuk pengawas. Pak Wiratno tahu, nanti mohon disampaikan juga Pak Wiratno sekarang ini hubungannya dengan penganggaran. Saya pikir kalau kita bantu, dua atau tiga kapal pengawas, sangat menolong, saya pikir dengan jumlahnya juga masih tercover dengan biaya anggaran yang Kementerian Kehutanan miliki Pak Sekjen melauai Pak Menteri Pertanian, karena ada Pak Sekjenya, saya pikir ini perlu dicatat khusus.

Silakan Pak Daniel Johan.

F-PKB (DANIEL JOHAN, SE.):

Ia terima kasih

Pimpinan dan segenap anggota, Pak Menteri, Pak Sekjen, Dirjen dan seluruh jajaran.

Yang pertama penegasan ulang Pak, tolong dibantu yang ternak. Saya sejak Pileg pencoblosan sampai sekarang tidak berani ke dapil, karena, tidak berani benar, ditagih terus masalah ternak, tapi sudah koordinasi dengan Pak Dirjen dan untuk program yang lainnya toplah, kalau dimata tidak tahu dimata yang lain buat mata kami fraksi, Mentan termasuk yang terbaiklah menteri di kabinet Pak Jokowi. Kedepan mungkin yang harus diperkuat adalah hilirisasi ya, karena diujungnya ini setelah produksi baik, meningkat yaitu meningkatkan pendapat petani daya beli masyarakat dan saya rasa itu hanya bisa dilakukan dengan hilirisasi.

Nah yang kedua untuk KLHK Pak Sekjen. Kebakaran hutan tahun ini ampun luar biasa, dampaknya termasuk di Kalimantan Barat ya, sudah seminggu ini sekolah diliburkan, penerbangan tidak ada sama sekali. Jadi kesehatan masyarakat juga sangat terancam. Nah kedepan saya tidak tahu, mungkin kita benar-benar harus punya program yang kerja sama komunikasi berdayakan dengan baik masyarakat adat Pak, masyarakat adat sebagai garda terdepan. Sebagai mata telingnya kita semua, sehingga setiap ada titik kita langsung tahu, yang kedua, mereka benar-benar menjaga masyarakat tidak lagi menggunakan pembakaran lahan, apalagi khusus dimusim kemarau yang berkepanjangan seperti ini.

Nah yang kedua, saya terima kasih Pak, kemarin itu selang yang pemadam itu sangat berguna saat ini, sekarang lebi dari 100 pemadam swasta bergibaku bersama pemerintah ikut memadamkan lahan-lahan gambut yang terbakar. Bisa langsung di cek mereka itu tidak bisa tidur 24 Jam saat itu, mereka benar-benar karena Kalimantan Barat agak unik, mungkin satu-satunya provinsi yang memiliki pemadam swasta, sementara Pemdanya tidak punya Pak, di provinsi lain mungkin tidak ada. Nah jadi untuk tahun depan saya minta program pemberdayaan pemadam swasta ini dilanjutkan, jangan kasih selang lagi Pak, karena selang itu awet, tapi dalam bentuk lain mungkin pembinaan termasuk mereka tidak punya seragam yang untuk

mengamankan yang aman, entah helm entah apa, mereka benar-benar memakai baju biasa.

Jadi itu saja dua hal. Sekali lagi terima kasih, sukses.
Terima kasih.

F-GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, MM.):

Ketua, satu menit.

Pak Menteri ada yang lupa. Di Kebumen Pak telah ditemukan traktor ajaib Pak, traktor menggunakan remot tanpa orang ya, itu menghemat 20% minyak dan kecepatannya lebih cepat. Ini kemarin dari Malaysia, mohon dari kita lebih dululah dari pada diambil, karena tambahnya satu traktor 5 juta Pak sudah bisa jalan. Sebenarnya nanti kalau ada waktu kita bawah yang menemukan untuk operasi disini untuk menunjukan pada teman-teman Kementerian dan teman-teman Komisi IV. Saya tadi tidak percaya Pak, saya lihat sendiri Pak, dari rumah saya 5 kilo. Anak-anak STM kok bisa menciptakan seperti itu.

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

la Bapak-Ibu sekalian.

Sebelum saya serahkan ke Pemerintah, saya menambahkan yang belum ditambahkan oleh teman-teman. Yang pertama selain kebakaran hutan, ada isu juga yang perlu juga ditanggapi oleh Kementerian Pertanian sehubungan dengan sertifikasi halal yang muncul di media yang katanya sudah tidak ada sertifikasi, walaupun Pak Dirjen sudah menjelaskan ke saya, saya sendiri belum paham dari tulisan itu, karena berhubungan dengan rapat dengan Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Mungkin dalam kesempatan ini mohon juga dijelaskan, sehingga menjadi dokumen kita.

Yang kedua, tentang Karhutla. Saya pikir kita tahu Karhutla ini memang sudah sering setiap tahun, tapi bukan berarti Komisi IV tidak menangani, karena terus terang yang pertama kita ajukan yang pertama kali anggaran kehutanan itu kita minta lebih besar lagi dari sekarang, bahkan tidak hanya masalah pengawasan. Apa yang sekarang dianggarkan oleh Kementerian Kehutanan, ini sifatnya jangka panjang, 2 triliun PPDS dan di KSDAE ini konsepnya jangka panjang, bukan jangka pendek. Sementara yang jangka pendek dipotong tidak sampai 200 miliar perubahan iklim. Padahal dulu perubahan iklim cukup besar. Nah tolong Pak Sekjen, Pak Menteri ini dijelaskan kepada kami, kenapa kok tiba-tiba seperti ini. Dulu kita sangat menggebu-gebu, tahun 2015 minta ini diperkuat, karena yang menjadi masalah kita bukan jangka panjang lagi sekarang, jangka pendek. Jangka pendek kita bagaimana dalam waktu tepat dalam cepat, kita bereaksi terhadap masalah-masalah ini, bahkan saya rasa reaksinya tidak begitu ekstrimlah, tidak hari ini masalah kita dengan proses musim hujan kita rencanakan musim kemarau, saya pikir ini bisa dilaksanakan. Dulu

karena anggaran terbatas, akhirnya kita sepakat menurut kita ikut kita tadinya mengusulkan untuk membeli heli sebagai back up, karena be heli kalau kita sewa, pasti mahal, karena pasti ujungnya nilai darurat, kalau sudah darurat di Indonesia ini tidak ada yang nilainya di bawah dua kali, tapi lebih dari tiga kali, itu sudah jaminan, kalau perlu bukti saya bisa buktikan dengan angka-angka, cuma kita tidak mau memperpanjang dengan hal itu, intinya sekarang adalah masalah kebakaran hutan tolong dijelaskan, kenapa direktorat jenderal yang harusnya menangani kebakaran ini dari awal, anggarannya sangat kecil sekali.

Yang kedua, Pak untuk Menteri Pertanian. Saya pikir pasti kena dampaknya, pasti kena dampaknya dan Bapak juga hasur siap-siap. Tolong didata juga ini hasil kebakaran pasti akan ada merambah kelahan pertanian kita, pertanian maupun perkebunan yang ujungnya berdampak. Kalau urusan perusahaan saya yakin perusahaan itu sudah punya hitung-hitungannya melalui asuransi dan sebagainya. Tapi kalau masyarakat petani, ada 40% petani sawit rakyat Indonesia yang sekarang ini pasti sebagian besar mengenai dampak itu, petani karet dan petani-petani lainnya. Mohon juga ini dari PSP, dari Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Perkebunan didata, jangan kita menunggu lagi, sekarang sudah mulai hitung, begitu yang pertama muncul pertanian, sudah siap dengan kami akan distribusi ini, ini, ini, toh barangnya ada.

Saya pikir ini tiga hal dari saya untuk melengkapi masukan dari teman-teman tadi.

Kami persilakan Pak Menteri.

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Terima kasih Pak Ketua dan kOmisi IV yang saya banggakan.

Pertama-tama kami meminta maaf dengan segala kerendahan hati kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Koimisi IV, khususnya tadi Pak Sudin, kami mewakili kementerian, Ibu Menteri. Jadi kami bertanggung jawab penuh kami atas nama Menteri LHK dan Menteri Pertanian memohon maaf karena tertunda berangkat Kosta Rika.

Kemudian juga masalah Karhutla, kami Pak Sekjen kami minta tolong ini mejadi perhatian. Kemudian Dirjen pengendalian Perubahan Iklim. Pak tolong dibantu. Kemudian Dirjen Perkebunan dan PSP. Ada pengalaman kami Pak kita lihat secara angka-angka, Sumsel dan Kalsel, kebakarannya menurun. Kita menggerakkan alat mesin membantu petani dengan betul-betul luar biasa jumlahnya sampai ribuan kita kirim kesana, alhamdulillah kebakaran ya Pak Sekjen, mungkin Pak Dirjen tahu, Sumsel, Kalsel itu berkurang. Nah ini mungkin kita kedepan Pak Dirjen PSP Dirjen Perkebunan, tolong egosektoral kita cabut kita jaga NKRI ini adalah tanggung jawab kita semua, karena ini sudah masalah negara, masalah sosial, masalah pendidikan ini tersentuh semua. Sekali lagi kami minta maaf Pak, bahkan kami siap dimarahi, ditegur yang penting NKRI harga mati tetap satu.

Kemudian berikutnya kami tidak jawab semua. Yang kedua, ini tadi dari Pak Rahmad, Pak kami punya program, namanya GEMPITA (Gerakan Pemuda Tani Indonesia) sampai dengan hari ini, kurang lebih 500 ribu yang terlibat pemuda tani.

Kami beri langsung alat mesin pertanian dengan gratis, kami berikan bibit dengan gratis, jagung gratis mereka yang berkontribusi yang membalikan impor jagung 3 juta 10 triliun menjadi eksportir dan itu diapresiasi oleh dunia, termasuk kami baru pulang dari Argentina bersama Komisi IV, waktu itu saya dan Pak Edi tidak sempat ke Argentina, karena beliau haru balik dari New Zealand. Beliau apresiasi yang dulunya kita impor dari Argentina dan Amerika. Ini pertemuan kami biasanya Presidennya tidak menerima menteri, alhamdulillah kami diterima, tapi sayangnya eselon I yang kami bawah tidak boleh masuk, jadi kami diterima kami diskusi dengan....apa yang dilakukan Indonesia sehingga bisa swasembada jagung begitu cepat. Sederhana sebenarnya, beri kesempatan seperti Komisi IV yang selalu sampaikan. Beri kesempatan petani untung mereka berproduksi, bukan APBN yang ditunggu petani-petani kita, tapi beri kesempatan mereka untuk. Kalau dia merugi seberapa pun APBN diberikan itu sia-sia, kenapa, karena dia merugi, dia bangkrut secara masal. Ini kita keluarkan Perpres kalau tidak salah nomor 172, kita ada HPP 3150 harga jagung minimal sehingga ini yang menyelamatkan. Coba ditunjukkan pengaruhnya terhadap politeknik coba tunjukkan.

Bapak-Ibu sekalian.

Politeknik kita, dulu tidak ada mau mendaftarkan kita kejar orang, kita butuh 1000 yang mendaftarkan 980. Ini tahun 2013 kita kejar-kejaran tidak mau mendaftarkan, kita butuh 1000, yang mendaftarkan 900. Hari ini 17 tahun ini 17 ribu pelamarnya naik 1700%. Ini adalah dampak pertanian transportasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Mungkin ini kita lanjutkan nanti dan kami berdoa yang melanjutkan adalah dari Komisi IV.

Kemudian Pak Sulaiman, kalau bisa Saudara kita di Papua, bisa tidak ini perlu kita sampaikan, kita ulang juga. Pak ketua, diakhir masa jabatan ini, kami ijin mengulang, kami dulu disini dibuli masalah beras, karena ini penyebab inflasi. Hari ini inflasi kita turun 10 menjadi 1 dan naik sedikit tiga lagi 10%. Kemudian ini yang menarik, kemudian ini data BPS bukan data Pertanian. Kemudian sudah disampaikan oleh Pak Sulaiman Pak, Merauke gudangnya tidak muat, kemudian Jawa Timur sudah sewa gudang, Mares tadi disampaikan Pak Nasid, bahwa kondisinya memang seperti itu. Ini adalah gerakan masif kita modernisasi pertanian. Dan kami yakin Bapak-Ibu 2016 tidak import, 2017 tidak ada import, 2019 kami yakini 99% tidak ada impor untuk beras 3 tahun. 2015 kita ada import karena ada musibah terbesar sepanjang sejarah Elnino dan jauh lebih besar Elnino dibanding 1997, 1998. 1997-1998 kita ingat impor 12 juta ton, tapi itu Elninonya lebih tinggi 2015, tapi alhamdulillah kita impor 1,5 juta ton. Nah ini terkadang tidak diangkat terangkat kepublik, 3 tahun andaikan tidak terjadi Elnino bisa jadi kita tidak pernah impor dan hari ini kita berani mengatakan swasembada bukan swasembada tetapi kita berdaulat, karena berasnya cukup bahkan sekarang sewa gudang. Nah itu pertanggung jawaban kami karena ada dulu tapi orangnya sudah tidak adanya menyampaikan, itu mimpi disiang bolong kalau Indonesia tidak impor, mungkin Pak ketua masih ingat, karena Pak sudah 5 tahun disini, tapi kami maafkan, karena memang merekalah yang berjasa juga memotivasi kami sehingga ini terjadi.

Kemudian kami sampaikan tidak apa-apa, ini agak pahit. Inilah yang membuktikan ada bisa ditunjukkan harga beras agak naik sedikit. Ini membuktikan bahwa ada distribusi yang harus kita benahi, kenapa, dulu hukum ekonomi kita supply demand, kalau supplynya banyak, harga turun. Ini yang terjadi adalah sewa gudang bahkan tidak muat, tetapi harga naik, berarti ada mafia. Kalau kita tunjukkan, coba tunjukkan mafia yang kita selesaikan. Ini memang berat ini pahit, kita harus yakin bahwa yang mempermainkan ini pangan. Ini dulu menjadi kata alasan dulu, tapi ada buktinya coba ditunjukkan, ini asrotnya baru lagi mungkin, maaf tidak biaya asrot sekarang, biaya MC kami kurangi juga.

Bapak-Ibu, ada juga masalah yang kami minta maaf, yang traktor terkirim. Sebenarnya jangan saya sampaikan disini ada masalah Pak, 4 tahun tidak pernah terlambat aspirasi Bapak. Ada masalah dan "kami tempur habis-habisan" karena saya bilang kalau ada main-main direktur percaya aku pecat kalau saya pun aku mundur, kalau aku mempermainkan hak rakyat, ada masalah ini tidak elok kalau saya sampaikan di depan publik, tapi boleh nanti kalau berdua di luar. Ia lanjutkan saja diskusinya karena sudah agak tenang semua. Ada masalah kami minta maaf, kami yang salah, tapi ada masalah internal yang difitnah dan yang memfitnah itu berurusan dengan hukum. Coba operatornya, kami lanjutkan, karena operatornya sepertinya mandak ini.

Nah ini yang menarik, memang jujur kami harus akui bahwa teman-teman Komisi IV banyak ide, ide dan cerdas-cerdas. Kenapa beringin lagi mau ditanam. Pak dari kecil aku takut sampai sekarang, karena setannya katanya banyak, nanti menteri berikutnya akan tanam, aku takut, jujur lebih baik aku bilang tidak. Tapi itu menarik, benar itu beringin menyimpan air, tapi menyimpan setan juga. Jadi ijin kami menolak Pak Kyai, nanti bolehlah Pak Kyai tanam sendiri saja. Jadi memang ide-ide jujur Pak Darori, Pak Hermantoh dekatan tadi Pak Hasanudin dari Sumatera Barat Pak, sama hebat. Ini Pak Satgas yang blacklist adalah 65, yang berproses di KPK ada 2 orang dan kita sudah blacklist satu tahun sebelumnya, semua yang proses pangan di KPK, OTT terserah kami sudah blacklist sebelumnya, kami perlu pertanggung jawaban kepada Bapak. Ada 784 ini proses hukum, blacklist 65, 70 an kalau tidak salah, 72 sudah 800. Ini hasil kita kerja kita semua, yang bermain ada dan ini bukan perusahaan kecil, ada perusahaan sangat besar.

Kemudian Jenepono, Pak Irwan aku tahu, bukan Menteri PU salah, bukan pemerintah salah, sudahlah sekali-kali kita yang salah, Bapak salah dengan saya, aku bicara ini malu karena tanahnya saja tidak mau diserahkan untuk tersier, nah sedangkan yang lainnya luwuk, Ibu jadi yang luwuk. Pak Irwan nanti jujur aku sudah malu-malu minta tolong sama beliau. Traktor tunjukkan traktor. Traktor Pak ini yang terakhir. Kita kalau ingin merubah pertanian, kita lanjutkan ini pertanian modern Pak, bisa mencegah kebakaran ini. Jadi kita sudah buat nanti Autonomous. Jadi jarak jauh remot control ini tidak ada orangnya, nah bisa kita bertani jarak jauh, bisa dari bawah pohon. Inilah yang menarik petani milenial 500 ribu itu. Jadi menanam pakai alsintan, panen pakai alsintan. Dulu tanam 20 hari, panen 20 hari, ngolah 20 hari, itu 60 hari. Hari ini kita persingkat menjadi 5 jam. Jadi 60 hari menjadi 5 jam. Ini autonomous, ini buatan kita sendiri Pak, nanti sebentar lagi kita resmikan perguruan tingginya

namanya PV. Jadi kami dorong teknologi kami ke Jepang kami yakin kami tidak kalah dan Insya Allah dalam waktu dekat kalau ini konsisten, kita akan lewati teknologi Jepang untuk sektor pertanian. Ini semua buatan kita, *combine harvester*, ini menekan biaya 50% Pak Rahmad atau Pak Darori tadi. Pak Darori kalau yang itu saya apresiasi itu petani, bengkel, tapi kita buat grand desain yang besar, ini bisa 5 jam yang dulunya 6 bulan kita kerjakan, sekarang sudah berjalan, ini buatan kita Pak, tapi pernah hampir kena masalah karena ini karena kami paksakan para ahli di pertanian suruh buat, ternyata alat tanamnya benar-benar salah karena alat tanam benaran, pucuk, tengah dia tanam sama-sama, sekarang ini hasilnya sudah bagus.

F-PPP (HASANUDIN):

Mohon izin Pimpinan.
Interupsi sebentar.

Barangkali lebih eloknya Pak Menteri, kita lihat bersama-sama sekali kita pentaskan ini alat yang bagus ini.

Terima kasih.

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Oh bagus, tapi kan waktunya tinggal sedikit Pak, ini tinggal, sudah nanti Bapaklah, aku yang datang, aku datang sebagai konsultan. Jadi ini kita pakai coba angkat dronanya Pak, tanam pakai drone Pak untuk di rawa. Dulu biayanya 12 juta, ini bisa 5 juta seluruh paket penen dan inilah masa depan pertanian Indonesia kita harus jaga, memang banyak yang tidak senang karena triliun keuntungan dari impor terhenti nantinya. Sekarang jagung dulu 10 triliun, kita impor bawang merah, ada tadi maaf yang Pak Efendi, yang kedelai tadi. Jadi kita memang rancang Pak satu persatu-satu, aku hafal Bapak, kapau kedelai Babak konsen betul, kita membuat master plan grand desain untuk pertanian Indonesia, tidak bisa selesai sekaligus, anggaran kita terbatas. Memang kami tinggalkan dulu. Ini Pak, jadi nanti yang menyelesaikan yang dari sini Pak. Ini kedelai itu 2020 rancangan kita bawang putih ini bisa lebih cepat, jagung, padi, bawang merah, cabe selesai, ini juga ada yang selesai kambing kita sudah ekspor dengan domba. Nah kita 2045 bahkan 2026 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dan kita menjadi pengendali.

Terima kasih.

Wassalualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

Pak ini kita Jam satu, kita ada Paripurna, tapi kan kita sudah sepakat untuk Jam satu.

F-PPP (HASANUDIN):

Interupsi sedikit saja.

Sedikikit saja.

Mengingatkan Pak Menteri saja. Pak Menteri kami ingatkan, kalau subsidi untuk organik tidak bisa kami bisa non subsidi organik Pak.

Ia terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

Kalau memang tidak ada, kita langsung pada kesimpulan. Kita langsung baca kesimpulan ya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Karena ada, saya angkat tangan Pak.

KETUA RAPAT:

Kita kan ada Paripurna Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Sedikit saja, setengah menit.

KETUA RAPAT:

Program Bapak sudah sepakat semua disitu.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ia setengah menit saja. Setengah menit saja.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya menyampaikan apresiasi pada Pak Menteri yang telah merancang membangun pertanian kita menuju pertanian modern, karena itulah yang menjadi cita-cita kita dan itulah yang selalu saya sampaikan kepada petani.

Demikian.

Assalamualaikum.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Saya sudah tahu Bapak mau bicara itu, makanya saya tidak kasih waktu tadi, cuma karena Bapak maksa.

Baik Bapak-Ibu sekalian.

Langsung kepada kesimpulan.

Kesimpulan pertama untuk Kementerian Pertanian.

Kesimpulan/Keputusan.

1. Komisi IV DPR-RI menyetujui RAPBN Kementerian Pertanian tahun 2020 berdasarkan hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI dan Pemerintah sebagai sebesar Rp.21.686.516.683.000 yang bersumber dari.
 - a. Rupiah Murni sebesar Rp.20.781.579.145.000,
 - b. Rupiah Pendamping sebesar Rp.5.150.000.000,
 - c. Pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp.171.862.781.000,
 - d. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp.96.717.600.000,

Dengan komposisi program pereselon I sebagai berikut.

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp.1.861.673.046.000,
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp.105.328.596.000,
- c. Dirjen Tanaman Pangan sebesar Rp.5.762.808.824.000,
- d. Dirjen Hortikultura sebesar Rp.1.082.601.627.000,
- e. Dirjen Perkebunan sebesar Rp.1.525.816.437.000,
- f. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.2.022.297.255.000,
- g. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp.3.503.898.216.000,
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp.1.800.970.429.000,
- i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar Rp.1.700.617.131.000,
- j. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp.663.563.546.000, dan
- k. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp.1.025.728.419.000,

Dari angkanya Pak Menteri, apakah ada perubahan Pak?
Bisa disetujui?

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Siap.
Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Teman-teman kita ambil persetujuan untuk jumlahnya.

ANGGOTA DPR-RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT : SETUJU)

F-PPP (HASANUDIN):

Totalnya yang di atas mohon diperbaiki, 21.055 tolong diperbaiki.

KETUA RAPAT:

Ulangi.

F-PPP (HASANUDIN):

Rp.21.055.309.526.000 Baik, yang lain sudah betul.

KETUA RAPAT:

Baik jumlah total, saya ulangi untuk jumlah totalnya ada perubahan dari apa yang saya sebutkan tadi, menjadi Rp.21.055.309.526.000. Pereselon I nya sudah benar? Baik, kalau begitu tadi salah penjumlahannya saja.

Bapak-Ibu sekalian kita ambil persetujuannya ya.

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi IV DPR-RI menyetujui anggaran dana alokasi khusus DAK Bidang Pertanian tahun 2020 sebesar Rp.1.500.000.000.000 yang terdiri dari DAK Provinsi sebesar 384 miliar dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp.1.116.000.000.000.

Jumlah ini tidak ada perubahan dari rapat kerja terdahulu.
Pak Menteri bisa setuju?

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Teman-teman kita ambil persetujuan ,setuju?

(RAPAT : SETUJU)

3. Komisi IV DPR-RI menyetujui alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2020 sebanyak Rp.7.949.303 ton atau setara dengan Rp.26.627.384.695.943. dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Urea sebanyak Rp.3.274.303 ton atau setara dengan Rp.11.348.344.555.943.
 - b. SP36 sebanyak 500 ribu ton atau setara dengan Rp.1.698.239.500.000.
 - c. ZA sebanyak 750 ribu ton atau setara dengan Rp.1.349.169.000.000,
 - d. NPK sebanyak Rp.2.705.000 ton atau setara dengan Rp.11.128.911.000,
 - e. Pupuk Organik sebanyak Rp.720.000 ton atau setara dengan Rp.1.142.720.640.000,

Dari angkanya dari pupuk ada perubahan angka?
Pak Menteri ini angkanya sudah oke?

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju.
Teman-teman bisa kita ambil persetujuan?

F-PPP (HASANUDIN):

Belum, belum nomor e Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PPP (HASANUDIN):

Tambah kata-kata Pak, e pupuk organik/pupuk organik cair.

KETUA RAPAT:

Sama saja Pak.

F-PPP (HASANUDIN):

Beda Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak Pak, semua pupuk organik sama. Ini sudah kita pakai digunakan cair juga bisa.

F-PPP (HASANUDIN):

Bisa kan Pak ya.

KETUA RAPAT:

Bisa Pak, tergantung itu penggunaannya. Begini Pak, penggunaan pupuk itu, itu nanti hubungannya sebagai supervisinya melalui PT. Pupuk Indonesia. Jadi kalau nanti ada usulan apapun silakan saja masukan kesana, karena Menteri Pertanian pun akan mensupervisikan melalui PT. Pupuk Indonesia, supaya menghindari siapapun yang akan ikut dalam berkontribusi mengurus pupuk ini, kualitasnya dilakukan oleh PT. Pupuk Indonesia, cair ataupun bukan cair selama organik tidak ada masalah.

Teman-teman bisa kita ambil persetujuan?

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT : SETUJU)

4. Komisi IV DPR-RI mendesak Pemerintah Sekeu Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan kurang bayar subsidi pupuk sebesar Rp.9.818.329.939.271 antarlain:
 - a. Tahun 2015 sebesar Rp.5.045.329.128.458,
 - b. Tahun 2016 sebesar Rp.2.939.751.206.345,
 - c. Tahun 2017 sebesar Rp.1.833.249.604.468,

Sebelum saya minta persetujuan, saya mau tanya ke Direktur Pupuk. Ini angkanya sudah benar belum? Karena data ini kita ambil dari data hasil audit BPK.

DIRUT PUPUK INDONESIA:

Sudah benar Pak, hanya yang tahun 2018 belum masuk Pak ya.

KETUA RAPAT:

2018 belum masuk.

DIRUT PUPUK INDONESIA:

Itu juga duitnya sudah selesai BPK.

KETUA RAPAT:

Sudah.

DIRUT PUPUK INDONESIA:

Sudah Pak.

KETUA RAPAT:

2018 dan 2019 ya.

DIRUT PUPUK INDONESIA:

Kalau 2019 masih tahun berjalan Pak, yang 2018.

KETUA RAPAT:

Maaf Pak, dua ribu berapa?

DIRUT PUPUK INDONESIA:

2019, kalau 2019 masih tahun berjalan Pak, belum diaudit.

KETUA RAPAT:

Sekarang dua ribu berapa yang belum masuk?

DIRUT PUPUK INDONESIA:

2018 Pak.

KETUA RAPAT:

2018.

Baik, nanti begitu masuk, langsung kita ambil keputusan kita putuskan disini. Saya secara prinsip yang ini sudah benar angka-angkanya.

Pak Menteri Pertanian bisa kita ambil keputusan?

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Teman-teman kita setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Bapak-Ibu sekalian.

Demikian 4 (empat) kesimpulan Komisi IV hari ini. selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan di kehutanan. Untuk Kementerian Kehutanan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ketua, sebelum membacakan kesimpulan, kami ingin minta penjelasan dahulu tentang tindakan dan langkah untuk pemadam kebakaran, karena tadi tidak ada penjelasan.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan sekaligus tadi yang daging halal.

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Terima kasih Pak Ketua.

Terima kasih Pak Hermantoh.

Hari ini kami mewakili Kementerian Kehutanan, karena beliau ada di lapangan, begitu perhatiannya luar biasa. Kami komunikasi terus tadi malam, saya katakan demi negara aku yang mewakili, tangani semua Pak Menteri, ia, termasuk kalau dimarahi, biar aku yang dimarahi, yang penting bisa padam itu kebakaran di sana. Jadi beliau ada di Riau Pak hari ini. Nanti detailnya kalau Bapak bertemu beliau, oh sudah berkomunikasi, berarti bertanya disini formalitas saja Pak ketua. Aku jawab formalitas bahwa beliau ada di lapangan, sehingga kami wakili hari ini, bukan beliau ke luar negeri, tapi pergi menyelesaikan ini masalah Karhutla.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sama penjelasan tadi Pak, masalaha halal. Kemudin yang anggaran Dirjen perubahan iklim yang tidak sampai 200 miliar itu.

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Jadi halal Pak. Jaminan halal juga, begitu kami lihat berita, malam itu kami tindaklanjuti aku katakan selesaikan, besok pagi harus kita pasti ditanya Komisi IV, ternyata alhamdulillah jaminan halal untuk produksi hewan ditingkat nasional, itu diatur dalam Permentan nomor 42 Tahun 2019 Pasal 7, Pasal 51 ayat (4) sampai dengan 6. Jadi tetap.

KETUA RAPAT:

Tapi isu itu harus bertanggung jawab yang menyebarkan isu itu, karena edarannya seolah-olah kita import dari daging apapun tanpa sertifikasi halal, karena ini menjadi isu yang sangat cukup, karena beritanya berita dari lumayan media yang cukup menari.

Mungkin Pak Sekjen mungkin bisa jelaskan masalah anggaran tadi, anggaran harus dijelaskan, karena ini menjadi domain publik kebarnya sudah luar biasa, anggarannya tapi turun, tapi kita harus punya pegangan. Padahal kita dulu dari 2015 minta anggaran disektor ini besar masalah perlengkapan, mungkin ada strategi lain, itu yang perlu kita sampaikan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua sedikit saja.

Menguatkan apa yang disebutkan oleh Pak ketua tadi, terkait dengan lebel halal terhadap daging hewan. Ini kan isu yang kita terima itu adalah bahwa Indonesia itu kalah Sidang WTO terkait dengan persoalan ini kalah dengan Brazil. Nah ini tentunya dampaknya kepada sistem perekonomian dan perdagangan internasional. Saya pikir ini produk-produk daging yang masuk ke Indonesia nanti, itu akan berdampak kepada lebel halalnya begitu. Jadi saya pikir ini dia akan bebas masuk di sini, karena itu adalah sudah konteknya internasional. Kalau konteknya Indonesia, barangkali kita bisa pakai aturan itu.

Demikian.

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Ketua.

Ini memang keadaan diresepsikan bahwa halal sudah selesai Pak ya, ada Permentannya. Tetapi seakan-akan bahwa kalau kita kalah di WTO, itu bebas masuk, tidak semudah itu Pak, kita alat kontrolnya direkomendasi, rekomendasinya tidak mungkin. Rekomendasi keluar sesuai dengan kemampuan negara. Kita sekarang ayam contohnya, kami bertemu dengan Wakil Menteri dengan Menterinya, mereka ingin mengirim ayam waktu itu, karena dia menang di WTO. Saya katakan, kita ini mau bersahabat atau ribut. Akui ini sudah oper supply, kami sudah ekspor ke Jepang, Malaysia, Singapura, terakhir Timor Leste, kita sudah ekspor ayam, mau dikirim kesini. Tolong cari yang kami butuhkan dalam negeri ini masih minim, itu yang anda bawah, waktu itu susu, susu kita masih 80% impor. Kami diskusi dengan menterinya langsung. Kalau Bapak mau paksakan, itu namanya bukan negara bersahabat. Ada kata-kata saya sehingga mereka mundur, ah aku khawatir dimuat nanti di media, memang ada keras kami berikan kedia kata-kata langsung mengatakan ia, kami tidak bicara lagi tentang hal itu.

KETUA RAPAT:

Pak bicarakan saja disini, ini kan forum resmi Pak.

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Terima kasih Pak.

Cukup Pak, tinggal tiga minggu ini.

KETUA RAPAT:

Itu bagus Pak, untuk memotivasi generasi muda calon pemimpin-pemimpin bangsa meniru ada pemimpin yang berani.

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Laporkan Pak, kalau kita mau di luar kan, masih saya melapor sama Bapak, nanti sebelum pulang.

KETUA RAPAT:

Baik.

Pak Sekjen tolong lengkapi, ini hanya untuk kita cerita, bahwa memang faktanya disisi lain kita seolah-oleh tidak serius mengantisipasi kebaran, anggaran Bapak 183 miliar saja di perubahan iklim, kalau yang lain-lain jangka panjang, itu benar, tapi kebarakan tidak menunggu jangka panjang.

Silakan Pak.

SEKJEN LHK:

Terima kasih Pimpinan.

Mohon Ijin Bapak Menteri LHK.

Terkait dengan Karhutla, saya ingin menjelaskan sedikit Pak Pimpinan, bahwa komitmen Komisi IV untuk karhutla ini kami ucapkan terima kasih atas dukungan selama ini. Dan yang menjadi catatan kami, dengan mekanisme penganggaran di Bappenas. Bahwa program di Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, itu sudah masuk dalam prioritas nasional dan selama ini itu masuknya hanya dikegiatan prioritas bahkan proyek prioritas, sekarang dia sudah masuk keprioritas nasional empat. Artinya, bahwa ketika kita sebagai KLHK, itu harus fokus untuk kegiatan-kegiatannya di dalam kegiatan Karhutla itu ada tiga besar Pak, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, KLHK itu lebih cenderung ke pencegahan. Dan untuk penanggulangan itu mengarah ke BNPB karena telah terjadi api harus dipadamkan dan sebagainya, kita juga ada, tapi dalam kaitan dengan tenaganya. Nah kemudian pemulihan itu juga KLHK juga ada pasca pemulihan itu didekati dengan pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Besarnya justeru ada di tiga ini Pak, di BRG itu masuk di kami dan Pak Karli juga ada. Jadi gambut itu justeru sekarang sudah besar sekali, ketika pemulihan bicara dari Karhutla tadi.

Nah untuk pengendalian perubahan iklim, kita lebih banyak kedua kegiatan besar Pak, yaitu pencegahan dan penanggulangannya. Kemudian ada pengendalian atau penambahan kapasitas tenaganya, kita punya manggala agni Pak. Justeru sekarang ini manggala agni yang terus kita tingkatkan, terus kita pasilitasi, terus dibiayai segala macam termasuk tenaga masyarakat peduli api yang bukan hanya KLHK, tapi justeru ditingkat tapak tadi ketika bicara organisasi ditingkat tapak, itu kita harapkan Pak Camat, Pak cama tadi yang ada usulan untuk dikoordinir, itu juga menjadi bagian kita. Sehingga totalitas Pak, ti tahun 2020, anggaran kita sudah 313 miliar 272 juta 831, setengahnya bahkan 60% nya itu kurang lebih 180 miliar itu sudah untuk Karhutla, sehingga pengendalian perubahan iklim dalam kaitan dengan Direktorat-direktorat yang lain Pak di Ditjen PPI, kita hanya menggunakan intervensi regulasi, bukan intervensi anggaran. Dan nanti kalau seandainya nanti di dalam sistem yang kita bangun itu memerlukan dan bahkan pendekatan ditingkat tapak

memerlukan jumlah orang yang terlibat di dalam pencegahan khususnya, mohon ijin Pak.

Patroli Pak yang memang kita dorong untuk ditingkat tapak baik di hutan di lahan, itulah sebenarnya kerja bersama kita kalau ijin kami sampaikan, kita tidak sendiri Pak, KLHK tidak sendiri. Kita memang kaitannya dengan landscape kalau yang Ibu bilang sekarang payer landscape. Itulah yang menjadi pendekatan ekosistem, sehingga kita sangat pegang yang namanya sipongi. Hot spot itu sekarang sipongi sekali, semuanya sudah pakai itu, itu dekati dari BMKG didorong dari 8 menjadi satu kesatuan. Sebenarnya di pemerintah jujur, Kementerian Lembaga dalam hal pencegahan itu sudah menjadi satu kesatuan. Sehingga totalitas 180 miliar Pak ijin, 2020, itu sudah kenaikan hampir dua kali lipat dibandingkan 2019. Dengan catatan bukan kita bukan sendiri, ada justeru BNPB tambah naik lagi. Ketika sekarang sedang dilakukan penanggulangan, disitulah kerja dari BNPB kita juga punya tenaga pemadam darat masyarakat peduli api, termasuk anggaran water bombing ketika harus pemboman untuk air, membom air di lokasi-lokasi yang jauh dari pusat, areal yang tidak terjangkau. Sementara kalau yang terjangkau itu. Jadi mohon ijin pimpinan, nanti kami akan exercise juga di dalam kaitannya dengan anggaran 2019, nantinya kita akan fokuskan dalam waktu satu dua bulan ini, Ibu Menteri sudah memberi arahan untuk tekankan pencegahan dan juga membantu penanggulangan, sehingga sekarang teman-teman tapak itu barusan ini juga ada komunikasi mereka sedang memadamkan dimana-mana dan kami sedang bekerja Bapak dan kejadian adanya api, itulah yang seharusnya arahan Bapak Presiden tidak boleh ada api dan kalau ada api, segera padamkan. Tapi ini sudah menjadi bagian penting dan kami laporkan juga kunjungan Bapak Presiden pada hari ini, rencana sampai esok hari dan Ibu Menteri mohon ijin tidak bisa hadir, karena mendampingi dan juga akan ada koordinasi sinkronisasi kerja di lapangan untuk daerah.

Saya rasa itu Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

Bisa kepada kesimpulan ya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ketua, sebentar sedikit ketua, karena ini masalah rakyat dan juga masalah kita bersama.

Saya pikir memang kebakaran hutan ini memang harus segera dilakukan tindakan tegas, karena ini juga faktornya bukan hanya faktor alamiah, tapi ini juga ada para pelaku punya perilaku begitu. Dan juga saya minta supaya kita ini punya early warning system terhadap kebarakan hutan, kita punya pemantauan citra satelit. Apa sejak awal itu bisa kita ketahui sehingga ada tindakan lebih awal untuk supaya tidak menjadi besar. Jadi saya pikir ini saya minta supaya para pihak yang terkait dengan

Karhutan ini, betul-betul membaca secara dini early warning system itu, sehingga ada langkah yang lebih tepat, kalau sudah meluas begini, ia akibatnya harus ada tindakan keputusan politik untuk mengambil keputusannya.

Begitu Pak ketua.

KETUA RAPAT:

Ia terima kasih.

Bapak-Ibu sekalian, kita langsung kepada kesimpulan ya.

Kesimpulan pertama.

1. Komisi IV DPR-RI menyetujui RAPBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020, sebesar Rp.9.319.325.816.000, yang bersumber dari:
 - a. Rupiah Murni sebesar Rp.4.898.015.510.000,
 - b. Rupiah Murni Pendamping RMP sebesar Rp.18.088.804.000,
 - c. Pendapatan Negara Bukan Pajak PNBP sebesar Rp.1.000.000.000.000,
 - d. Hibah Luar Negeri HLN sebesar Rp.295.996.537.000,
 - e. Surat Berharga Seharian Negara SBSN sebesar Rp.237.411.500.000,
 - f. Badan Layan Umum BLU sebesar Rp.68.350.000.000,

Ini kurang uangnya, ada yang, dimana ini uangnya tersisi, 9 miliar, tetapi penambah-penambah cuma satu yang triliunnya, 4 triliun, lebih kurang 2 triliun Pak, tidak ada itu. Itu 9 triliun, tapi itu, bukan Pak, ini kita bicara sumbernya saja masih kurang Pak. sumbernya a-f itu saya hitung secara abstrak tidak sampai 6 triliun. Sementara anggaran kita bicara 9 triliun 319. Ini ada masalah dimana? Bukan Pak, sumber uangnya, bersumber dari. Betul Pak, kan sumbernya dari mana itu Pak? yang lainkan sumbernya, semua sumber jumlahnya 9 triliun.

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Ijin Pak.

Ini 9 triliun ini adalah total. Kemudian ada yang tidak masuk, karena aku baca tadi, aku masih ingat. Biaya pegawainya kalau tidak salah itu 4 triliun hampir 5 triliun, benar tidak? Non operasional. Jadi tolong ditambahkan saja sekaligus, pegawainya masuk Pak, nanti tidak digaji pegawainya ribut itu.

KETUA RAPAT:

Bukan Pak, bukan itu Pak. Ini kan kita bicara sumber keuangannya Pak. Rupiah murni itu harusnya kalau memang angka-angka lainnya itu miliar-miliar, satu triliunnya cuma ada dipendapatan bukan pajak, berarti kan yang lain itu bukan 4,898, harusnya mungkin 8 atau 7,9 berapa. Coba ini keuangannya bagaimana, kita harus mengesahkan.

SEKJEN LHK:

Pak ketua.

Rupiah murni itu ditambah dibelanja operasional, belanja pegawai.

KETUA RAPAT:

Bukan Pak, sumbernya. Rupiah murni berarti.

SEKJEN LHK:

Saya bacakan.

Rupiah murni tolong dirubah. Rp.7.699.478.975.000.

KETUA RAPAT:

Kok bisa meleset dapat data dari mana itu.

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Memang Pak, kalau calon menteri masih grogi, kalau sudah lama diulak, tidak grogi lagi.

KETUA RAPAT:

Saya laporkan Ibu Menteri nanti, tidak kerja serius orang keuangannya ini.

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Jangan Pak, ini menterinya Pak.

KETUA RAPAT:

Untung saya mengerti angka. Coba ini dijumlahkan, benar tidak jumlahnya.

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Benar tidak 9,3 triliun.

KETUA RAPAT:

Logikanya masuk, tapi kelebihan. Kalau ini 8699.

SEKJEN LHK:

Itu ijin Pak, ada di halaman 16 Pak. Rupiah yang murni tadi itu baru belanja non operasional, ditambah belanja operasional 2 koma sekian, jadilah 7 koma sekian dan ditambah di luar rupiah murni, baru cocok pagunya. Ada di halaman 16 Pak. Jadi teman-teman menggabungkannya itu tidak sesuai dengan harapan.

KETUA RAPAT:

Pak data ini kita tidak menulis disini, kalau bukan orang Bapak yang mengasih. Jadi sudah benar ini Pak ya, sudah.

Baik, ada perubahan dari sumber dari rupiah murni sebesar 7 triliun, tadinya 4 menjadi Rp.7.699.478.975.000.

Pak Menteri bisa setuju?

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Teman-teman kita bisa ambil persetujuan?

Belum setuju ini, dengan komposisi program pereselon I sebagai berikut.

- a. Sekjen sebesar Rp.592.759.666.000,
- b. Irjen sebesar Rp.86.966.609.000,
- c. Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lesatari sebesar Rp.301.754.834.000,
- d. Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebesar Rp.2.799.916.214.000,
- e. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp.2.049.226.996.000,
- f. Dirjen Planology Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp.480.427.464.00,
- g. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi sebesar Rp.393.833.245.000,
- h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp.341.386.089.000,
- i. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp.458.679.200.000,
- j. Dirjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp.468.790.771.000,
- k. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp.313.272.831.000,
- l. Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya sebesar Rp.361.844.139.000,
- m. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp.357.472.233.000,
- n. Badan Restorasi Gambut sebesar Rp.312.995.525.000,

Pak Menteri angka-angkanya sudah benar?
Bapak-Ibu sekalian, bisa kita ambil kesimpulan, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Kesimpulan nomor dua untuk Kementerian Kehutanan.

Komisi IV DPR-RI menyetujui anggaran dana alokasi khusus DAK bidang lingkungan hidup dan kehutanan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.612.200.000.000 yang terdiri dari DAK sub Bidang Lingkungan Hidup sebesar 312 miliar alokasi di 12 provinsi dan 139 Kabupaten/kota dan DAK Sub Bidang Kehutanan sebesar Rp.300.200.000.000 alokasi di 33 Provinsi.

Angkanya sudah benar Pak Menteri?

Setuju?

Teman-teman kita ambil persetujuan, setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Bapak-Ibu sekalian.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobilalamin demikian kita menyampaikan dua kesimpulan dari Rapat Kerja kita dengan Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelum kita akhir, kami persilakan untuk kedua menteri untuk menyampaikan kata penutup.

ANDI AMRAN SULAIMAN (MENTERI PERTANIAN):

Terima kasih,

Kami atas nama Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup mengucapkan terima kasih atas suportnya seluruh Bapak Pimpinan Komisi IV, Wakil Pimpinan Komisi IV dan seluruh Anggota Komisi IV. Juga kami mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kalau ada khilaf selama ini, termasuk selama berlangsungnya rapat pada hari ini.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Bapak-Ibu sekalian.

Demikian Rapat Kerja kita hari ini dengan kedua Kementerian, Menteri Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, semoga hasil kerja kita hari ini akan menjadikan buah yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, bagi negara kita, bagi generasi penerus bangsa kita.

Terima kasi kami ucapkan kepada seluruh Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi IV atas mitra kerja Bapak Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pertanian, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia dan mitra-mitra di BUMN, Kementerian di Bidang Kementerian ini, kami mohon maaf, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan secara prinsip, apa yang kita lakukan adalah demi Merah Putih dan demi Burung Garuda yang tercinta.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salamat siang salam sejahtera bagi kita semua,
Om santi, santi, santi om

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.45 WIB)

Jakarta, 16 September 2019
Ketua Rapat,

ttd

EDHY PRABOWO, MM, MBA
A-71